

POLISI PANTAU MASSA AKSI 27/8 KE JAKARTA

RATUSAN WARGA BANTEN IKUT DEMO

SERANG, BANPOS – Gelombang massa dari Banten dipastikan turut meramaikan aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (27/8). Sekretaris Jenderal BEM Banten Bersatu, Toriq Surya Pawitra, menyebut sedikitnya 500 orang dari berbagai elemen masyarakat dan

mahasiswa akan bertolak ke Jakarta.

Toriq mengatakan, massa yang berangkat tidak hanya berasal dari aliansi BEM Banten Bersatu, tetapi juga Aliansi Mahasiswa Masyarakat Banten, Permai, mahasiswa UPI, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.

“Kalau yang berangkat itu, aliansi Banten Bersatu. Lalu ada aliansi Mahasiswa Masyarakat Banten. Lalu nanti ada teman-teman Permai, teman-teman UPI juga,” kata Toriq kepada BANPOS, Rabu (26/7).

Menurutnya, berdasarkan pendataan se-

mentara, terdapat sekitar 10 bus yang digunakan untuk membawa massa dari Banten. Selain menggunakan bus, sebagian peserta aksi memilih berangkat menggunakan kereta api dan sepeda motor.

BACA **RATUSAN** HAL - 9

MAHASISWA KRITIK KINERJA PEMPROV

SERANG, BANPOS - Aliansi BEM Banten Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (26/8). Dalam aksi tersebut, mahasiswa

melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait tata kelola sektor pendidikan, isu krisis lingkungan, hingga arah kebijakan ekonomi yang dinilai

belum berpihak pada rakyat kecil.

Melalui naskah kajian bertajuk “Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan: Merdeka di Atas Kertas, Terjajah Secara Realitas di Tanah Jawara” Koordinator Umum

Aliansi BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni. Menurutnya, kemerdekaan

BACA **MAHASISWA** HAL - 9

Vox Populi



Taufiq Solehudin
WARTAWAN BANTEN POS

Muak kepada Gagap

SEBAGIAN dari teman-teman saya, termasuk saya sendiri, saat ini tengah dilanda perasaan muak. Muak, semuak-muaknya.

Kenapa bisa begitu? Karena pemerintah saat ini dengan telanjang bulat kerap memperlihatkan kegagapannya ketika dihadapkan pada persoalan penanganan bencana.

Tentu di antara kita masih segar dalam ingatan bagaimana lambannya respon pemerintah dalam menangani kasus bencana di Sumatera. Bahkan, kabarnya, hingga saat ini sebagian wilayah di Sumatera yang dilanda musibah

BACA **VOX POPULI** HAL - 9



AKSI BEM BANTEN BERSATU

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu, menggelar aksi di KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (26/8). Aksi tersebut merupakan bentuk refleksi 81 tahun kemerdekaan, yang juga mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk membenahi sejumlah persoalan yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.

DZIKI OKTOMALIYADI/BANTEN POS

Menjaga Asa Banten dari Ruang Kelas Sehat

Oleh: Edwin Mahesa Pardede

HANGATNYA suasana dan semilir angin halaman SMAN 8 Pandeglang menyambut kehadiran Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni. Namun, suasana hari itu

melampaui hiruk-pikuk penilaian Lomba Sekolah Sehat.

Di balik deretan pot bunga yang tersusun rapi dan lorong sekolah yang resik, tersimpan misi besar: membentuk tabiat generasi masa depan Banten. Bagi Tinawati, kompetisi ini bukanlah

BACA **MENJAGA** HAL - 9



EDWIN MAHESA PARDEDE/BANTEN POS

BANK BANTEN KC PANDEGLANG TEMPATI GEDUNG BARU

03

DISOROT KEJAKSAAN, DEWAN BAKAL EVALUASI DINKES

04

DEWAN INGATKAN OPD TAAT REGULASI DI TENGAH MARAKNYA OTT

06

PEMKAB GENJOT LITERASI

08

PERUBAHAN STATUS PPPK GURU PICU KECEMBURUAN

PPPK NON-GURU ANCAM TURUN AKSI

SERANG, BANPOS – Wacana pemerintah pusat yang akan menaikkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuai respons dari kalangan PPPK non-guru. Mereka meminta agar kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi PPPK guru, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga

BACA **PPPK NON-GURU** HAL - 9

HMI MPO Desak Usut Oknum Lokal Kasus Korupsi MBG

PNS Pemprov Diperiksa Kejagung

SERANG, BANPOS – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi

BACA **PNS PEMPROV** HAL - 9



Demokrat Bersihkan Cipunten Ageung

PANDEGLANG, BANPOS - Kepe-
dulan terhadap lingkungan diwu-
judkan jajaran Partai Demokrat
melalui gerakan “Ayok Mulyakan
Sungai”. Kader dan simpatisan
Demokrat bersama masyarakat
melakukan aksi bersih-bersih di
Sungai Cipunten Ageung, Keca-
matan Labuan, Kabupaten Pande-
glang, Rabu (26/8).

Anggota DPR RI Fraksi Partai
Demokrat, Rizki Aulia Natakusu-
mah, mengatakan gerakan terse-
but merupakan instruksi Ketua
Umum Partai Demokrat Agus Ha-
rimurti Yudhoyono (AHY) dalam
rangka menyambut HUT ke-25
Partai Demokrat pada 9 September
2026. “Gerakan Ayok Mulyakan Su-



Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Natakusumah saat membersihkan sampah Sungai Cipunten Agung.

ngai ini merupakan instruksi Ketua
Umum Partai Demokrat, Mas Agus
Harimurti Yudhoyono. Program ini
digagas untuk menyukkseskan hari

ulang tahun Partai Demokrat pada
9 September 2026 mendatang,”
kata Rizki kepada wartawan.
Dalam kegiatan tersebut, kader,

simpatisan, dan masyarakat bergo-
tong royong membersihkan sam-
pah yang menumpuk di sekitar
aliran sungai. Kegiatan juga me-
jadi momentum untuk mengajak
masyarakat menjaga kebersihan
lingkungan dan tidak membuang
sampah sembarangan. Rizki me-
negaskan, kegiatan tersebut bukan
agenda politik, melainkan gerakan
sosial yang diharapkan dapat me-
libatkan berbagai pihak, termasuk
pemerintah dan masyarakat. “Seja-
tinya ini bukan agenda politik. Kita
justru diinstruksikan merangkul
pemerintah sebagai gerakan ber-
sama, bukan gerakan politik yang
sempit. Kita mengajak seluruh ele-
men stakeholder untuk menyuk-

seskan pembersihan sungai-su-
ngai,” ujarnya.

Menurut Rizki, kegiatan bersih-
bersih sungai tidak cukup dilaku-
kan hanya sekali. Banyaknya sam-
pah yang ditemukan di Sungai
Cipunten Ageung menunjukkan
perlu nya gerakan berkelanjutan
yang melibatkan masyarakat.
“Yang saya lihat, luar biasa banyak
sampahnya. Mungkin gerakan kita
hari ini tidak cukup, tetapi harus
diikuti dengan gerakan serupa
yang dipelopori oleh masyarakat,”
katanya.

Ketua DPC Partai Demokrat Ka-
bupaten Pandeglang, MM Fuhaira
Amin, menambahkan, persoalan
sampah di sungai tidak dapat

diselesaikan hanya oleh peme-
rintah atau komunitas tertentu. Ia
mengajak seluruh elemen masya-
rakat ikut menjaga kebersihan
sungai secara berkelanjutan. Me-
nurutnya, kehadiran partai politik
di tengah masyarakat tidak hanya
dibutuhkan saat momentum
pemilu.

“Tentu sampah-sampah ini ti-
dak bisa dibersihkan oleh salah
satu partai. Justru kita ingin me-
ngimbau bahwa ini ada peran serta
masyarakat. Bukan kampanye,
tetapi kita ingin menunjukkan dan
merespons bahwa partai politik itu
hadir setiap hari, setiap minggu, se-
tiap bulan, bukan hanya 2029 saat
pemilu,” pungkasnya.(DHE/PAY)

RUANG PUBLIK

Jilbab, Zaman, dan Cara Kita Memahami Kesalehan

OLEH:

Ocit Abdurrosyid Siddiq
Alumnus Prodi Filsafat
IAIN SGD Bandung



KABAR tentang kadet perempuan
Universitas Pertahanan yang disebut
harus melepaskan jilbab dalam
kegiatan pendidikan reguler kembali
membuka perdebatan lama tentang
jilbab, agama, dan negara. Kemen-
terian Pertahanan kemudian
memberikan klarifikasi bahwa kadet
perempuan Muslim pada dasarnya
tetap diperbolehkan mengenakan
hijab dalam aktivitas sehari-hari,
kegiatan di luar kampus, dan agenda
magang, sementara pakaian dalam
kegiatan pendidikan reguler
disesuaikan dengan jenis kegiatan
yang mempertimbangkan disiplin,
keseragaman, serta keselamatan.
Kemhan juga menyatakan aturan
seragam akan dievaluasi agar
penggunaan hijab bagi kadet
perempuan Muslim dapat diakomo-
dasi. Peristiwa ini menarik karena
persoalannya segera bergeser dari
urusan seragam menjadi pertanyaan
yang jauh lebih tua: sebenarnya, apa
yang kita maksud ketika mengatakan
seorang muslimah “harus berjilbab”?

Pertanyaan tersebut tidak pernah
benar-benar selesai. Di tengah
masyarakat Muslim selalu terdapat
pandangan bahwa menutup aurat
merupakan kewajiban agama,
sementara pada sisi lain terdapat
pandangan yang melihat bentuk
jilbab tertentu sebagai produk sejarah
dan kebudayaan. Saya sendiri tidak
terlalu kaku dalam memandang
keharusan muslimah mengenakan
jilbab, terlebih jika yang dimaksud
adalah bentuk jilbab sebagaimana
populer sekarang. Bagi saya, penting
membedakan antara nilai agama
dengan bentuk budaya yang menjadi
ekspresi nilai tersebut. Kesopanan,
kehormatan, dan penutupan tubuh
dapat menjadi prinsip keagamaan,
sementara model kain yang diguna-
kan untuk mewujudkannya sangat
mungkin berubah mengikuti ruang,
waktu, kebiasaan, teknologi tekstil,
selera, dan perkembangan masyara-
kat. Dengan pembedaan itu,
perdebatan tentang jilbab menjadi
lebih jernih dan tidak mudah berubah
menjadi penghakiman terhadap
kesalehan seseorang.

Sejarah umat Islam sendiri
memperlihatkan bahwa busana
perempuan tidak pernah memiliki

satu bentuk tunggal. Bahkan dalam
lingkungan masyarakat Muslim
Indonesia, apa yang hari ini kita kenal
sebagai jilbab modern bukanlah
bentuk yang sejak dahulu hadir
secara seragam. Penelitian mengenai
perubahan mode busana muslimah di
lingkungan Muhammadiyah Yogya-
karta, misalnya, menunjukkan adanya
perubahan bentuk kerudung dan
pakaian sejak 1919 sampai 1989.
Penelitian itu mencatat bahwa Ahmad
Dahlan memperkenalkan model
kerudung seperti lgal dan Mudho-
warah, sementara pada 1931
Muhammadiyah menetapkan
kerudung sebagai aksesori wajib bagi
perempuan Muhammadiyah; bentuk
pakaian pun kemudian berubah dari
kebaya menuju baju kurung dengan
berbagai variasi. Fakta ini saja sudah
cukup untuk menunjukkan bahwa
praktik busana dalam komunitas
Muslim bergerak dan berubah. Kalau
bentuknya dapat berubah dari
generasi ke generasi, maka agak
sulit mengatakan bahwa satu model
visual tertentu merupakan satu-
satunya bentuk agama yang berlaku
sepanjang zaman.

Hal yang sama dapat dilihat dari
perkembangan perempuan dalam
lingkungan Nahdlatul Ulama.
Muslimat NU baru berdiri secara
resmi pada 29 Maret 1946 di
Purwokerto, sementara gagasan
mengenai organisasi perempuan NU
telah muncul sejak Mukhtar NU ke-
13 di Menes, Banten, pada 1938.
Dalam forum itu Nyai R Djuaesih dan
Nyai Siti Sarah tampil mewakili
jamaah perempuan dan berbicara
mengenai pentingnya peran
perempuan dalam organisasi,
masyarakat, pendidikan, dan dakwah.
Sejarah ini penting bukan semata-
mata karena kita sedang membica-
rakan pakaian, melainkan karena ia
menunjukkan bahwa perempuan
Muslim Indonesia sejak dahulu hidup
dalam proses perubahan sosial. Cara
mereka tampil di ruang publik, cara
mereka berorganisasi, cara mereka
berdakwah, dan tentu saja cara
mereka berpakaian, semuanya
mengalans negosiasi dengan zaman.
Karena itu, melihat busana
perempuan Muslim masa lalu hanya
dengan kacamata mode jilbab masa
kini berpotensi membuat kita keliru
membaca sejarah.

Saya juga tidak terlalu percaya
pada penjelasan sederhana bahwa
perempuan Muslim zaman
penjajahan memakai kerudung yang
tampak “asal tempel” semata-mata
karena mereka kekurangan kain.
Keterbatasan ekonomi mungkin
berpengaruh, tetapi menjadikannya
sebagai penjelasan tunggal terasa
terlalu mudah. Sebab, jika pada
waktu itu masyarakat dan para kiai
memahami bahwa bentuk tertentu
merupakan syarat mutlak kesalehan,
tentu akan ada dorongan untuk
mengusahakannya sejauh kemam-
puan memungkinkan. Kita tahu
bagaimana keluarga pesantren dan
para ulama pada masa lalu sangat
serius dalam mengatur pendidikan
agama, ibadah, akhlak, dan kehidu-
pan keluarga. Karena itu, saya justru

lebih tertarik pada kemungkinan
bahwa mereka memang memiliki
pemahaman keagamaan yang
berbeda dalam membedakan antara
prinsip menutup aurat dan bentuk
pakaian yang harus digunakan.
Dengan kata lain, bukan agamanya
yang kurang, melainkan ekspresi
kultural atas agama itu yang berbeda.

Karena itu pula saya tidak sepatat
jika perempuan Muslim generasi
terdahulu yang memakai kerudung
sederhana dianggap belum memiliki
pemahaman agama sebaik perem-
puan Muslim masa kini. Anggapan
semacam itu justru mengandung
kesombongan sejarah. Kita berbicara
tentang generasi yang melahirkan
banyak ulama besar, mendirikan
pesantren, menulis kitab, memba-
ngun madrasah, mendirikan
organisasi keagamaan, dan mem-
perjuangkan kemerdekaan. KH
Hasyim Asy’ari, misalnya, hidup
dalam tradisi keilmuan pesantren
yang sangat kuat, dan kehidupan
keluarganya juga berada dalam
lingkungan pesantren yang kental.
Sumber biografis mengenai Nyai
Masrurah, salah seorang istri Hasyim
Asy’ari, bahkan menggambarkan
kesederhanaan beliau dalam
kehidupan sehari-hari dan cara
berpakaian. Maka, perbedaan bentuk
busana tidak layak dijadikan ukuran
sederhana untuk mengatakan bahwa
generasi ulama terdahulu kurang
memahami agama. Justru mungkin
mereka memiliki cara pandang yang
lebih lentur dalam membedakan
substansi agama dengan bentuk
sosialnya.

Pada Ahmad Dahlan kita
menemukan gambaran yang juga
menarik. Beliau tidak hidup di luar
perubahan zaman, melainkan justru
berinteraksi dengan perubahan itu.
Pengenalan model Mudhowarah dan
lgal dari Makkah, sebagaimana
dicatat dalam penelitian sejarah
busana Muhammadiyah, menunjuk-
kan adanya pertukaran budaya dalam
praktik pakaian Muslimah. Kerudung
yang kemudian berkembang di
lingkungan ‘Aisyiyah bukan benda
yang turun dari langit dalam satu
bentuk jadi, melainkan mengalami
proses adaptasi dan perubahan. Ini
memperlihatkan bahwa keberaga-
maan masyarakat selalu berjumpa
dengan kebudayaan. Bahkan ketika
seseorang ingin menjalankan ajaran
agama secara sungguh-sungguh,
bentuk pelaksanaannya tetap
berlangsung dalam ruang sosial
tertentu. Agama memberi nilai,
sementara manusia mengolah nilai
itu melalui kebudayaan.

Kita kemudian dapat melompat
beberapa generasi dan melihat
fenomena yang lebih dekat dengan
kehidupan kita. Gus Dur, misalnya,
hidup dalam lingkungan pesantren
dan memiliki pemahaman keislaman
yang sangat luas, tetapi keluarga
beliau tidak menjadikan model jilbab
tertentu sebagai ukuran tunggal
kesalehan. Sinta Nuriyah sendiri
dikenal dengan pandangan yang
kritis terhadap pemahaman jilbab
yang berkembang di masyarakat,
sementara kehidupan keluarganya

menunjukkan adanya ruang bagi
pilihan personal perempuan. Bagi
saya, yang penting dari contoh Gus
Dur bukan apakah beliau dapat
dijadikan dalil untuk membenarkan
atau menyalahkan jilbab. Yang
penting adalah pelajaran mengenai
hubungan antara otoritas agama dan
kebebasan pribadi. Seorang tokoh
agama dapat memiliki keyakinan
keagamaan yang kuat tanpa merasa
harus mengontrol seluruh pilihan
busana orang-orang yang berada di
sekelilingnya.

Hal serupa terlihat pada Nurcholish
Madjid. Cak Nur merupakan salah
seorang intelektual Muslim Indonesia
yang memiliki pengaruh besar
terhadap pembaruan pemikiran
Islam, tetapi persoalan jilbab
keluarganya justru beberapa kali
digunakan orang untuk memperta-
nyakan pemikirannya. Istri Cak Nur
dan putrinya yang tinggal di Amerika
Serikat pernah menjadi objek
pertanyaan publik karena tidak
mengenakan jilbab. Di sini saya
melihat sesuatu yang agak ironis.
Kita sering mengagumi seorang
ulama atau intelektual karena
kedalaman pemikirannya, tetapi
kemudian menguji kualitas
keagamaannya melalui pakaian
anggota keluarganya. Seolah-olah
seorang ayah harus bertanggung
jawab secara teologis atas setiap
helai kain yang dipilih anak
perempuannya. Padahal, kedewa-
saan beragama justru dapat terlihat
dari kemampuan memberi ruang
kepada orang lain untuk mengambil
keputusan yang bertanggung jawab
atas keyakinan dan kehidupannya
sendiri.

Contoh Quraish Shihab bahkan
lebih terang lagi. Sebagai seorang
muftai yang memiliki otoritas
keilmuan dalam bidang Al-Qur’an,
Quraish Shihab tidak memaksa
putrinya, Najwa Shihab, mengenakan
jilbab. Ia menjelaskan bahwa terdapat
perbedaan penafsiran mengenai
penerapan perintah terkait pakaian
perempuan, termasuk mengenai
batas kepala dan tubuh yang harus
ditutupi. Dalam sebuah penjelasan
yang dikutip media, ia menyatakan
bahwa pilihan itu pada akhirnya
berada pada diri masing-masing
selama tetap memperhatikan agama
dan kepantasan. Najwa sendiri
pernah menjelaskan bahwa ia
memilih tidak berjilbab dan merujuk
orang yang ingin memahami
alasannya kepada literatur yang
ditulis ayahnya. Bagi saya, kasus
Quraish dan Najwa penting karena
menunjukkan bahwa perbedaan
pandangan tentang jilbab bahkan
dapat hidup dalam satu keluarga
yang sama tanpa harus berakhir
menjadi pertengkaran teologis.

Dari berbagai contoh itu saya tidak
sedang mengatakan bahwa pendapat
yang mewajibkan jilbab adalah salah.
Saya juga tidak sedang mengatakan
bahwa semua ulama terdahulu
sebenarnya berpandangan jilbab
tidak wajib. Kesimpulan seperti itu
akan sama simplistisnya. Pandangan
fikih yang mewajibkan penutupan
aurat memiliki sejarah intelektual

yang panjang dan dianut oleh banyak
ulama. Yang ingin saya soroti adalah
sesuatu yang berbeda: kewajiban
normatif tidak otomatis menetapkan
satu bentuk fashion yang berlaku
sepanjang sejarah. Bahkan di dalam
tradisi Islam sendiri terdapat
perbedaan penafsiran mengenai
batas aurat, bentuk pakaian, konteks
sosial, dan cara menerapkan
ketentuan tersebut. Karena itu,
menurut saya, terlalu jauh apabila
satu model jilbab kontemporer
diposisikan seolah-olah merupakan
satu-satunya bentuk yang sah
secara historis.

Masalah menjadi semakin rumit
ketika agama bertemu dengan
industri fashion. Jilbab hari ini bukan
hanya kain penutup kepala. Ia telah
menjadi industri, gaya hidup, identitas
sosial, simbol kesalehan, komoditas
ekonomi, dan bahkan penanda
kelompok. Model jilbab dapat
berubah mengikuti musim, merek,
influencer, kelas sosial, dan selera
pasar. Ada jilbab instan, pashmina,
kerudung segi empat, khimar, turban,
hijab syar’i, dan berbagai bentuk lain
yang terus berkembang. Dalam
keadaan seperti ini, kita perlu
bertanya dengan jernih: apakah
setiap perubahan model merupakan
perubahan agama, ataupun sekadar
perubahan cara kebudayaan
mengekspresikan agama? Saya
cenderung memilih jawaban kedua.
Sebab, jika model pakaian berubah
setiap beberapa tahun, tidak masuk
akal menjadikan model fashion
tertentu sebagai ukuran tetap untuk
menilai kualitas iman seseorang.

Di sinilah saya merasa perlu
membedakan substansi, simbol, dan
standar sosial. Substansi adalah nilai
yang diyakini agama, misalnya
kesopanan, kehormatan, dan
kewajiban menjaga aurat menurut
keyakinan seseorang. Simbol adalah
bentuk pakaian yang digunakan untuk
mengekspresikan nilai tersebut.
Sementara standar sosial adalah
penilaian masyarakat mengenai
apakah pakaian seseorang dianggap
cukup Islami atau tidak. Ketiganya
sering kali tercampur. Akibatnya,
standar sosial dapat menyamar
sebagai ajaran agama, sedangkan
fashion dapat berubah menjadi
ukuran kesalehan. Padahal,
seseorang dapat mengenakan jilbab
dengan sangat rapi tetapi tetap
memiliki persoalan akhlak,
sebagaimana seseorang yang tidak
mengenakan jilbab belum tentu
kehilangan seluruh kualitas moral dan
spiritualnya. Kesalehan manusia
terlalu luas untuk diukur hanya
melalui apa yang tampak dari luar.

Saya juga tidak terlalu setuju jika
perubahan itu kemudian dibaca
sebagai bukti bahwa kiai masa lalu
kurang saleh atau kurang memahami
agama dibandingkan kiai sekarang.
Bahkan saya berani mengatakan,
dengan sedikit humor, bahwa jangsan-
jangan kita sedang mengalami
paradoks zaman. Kainnya semakin
panjang, tetapi belum tentu
kesabarannya; kerudungnya semakin
rapi, tetapi belum tentu lisannya;
simbolnya semakin kuat, tetapi belum

tentu akhlaknya. Tentu ini bukan
tuduhan kepada semua orang yang
berjilbab, melainkan kritik terhadap
kecenderungan ketika simbol agama
menjadi lebih mudah dipamerkan
daripada substansi agama. Dan kita
juga tidak boleh romantis terhadap
masa lalu dengan menganggap
semua kiai terdahulu pasti suci dari
kepentingan duniawi. Setiap zaman
mempunyai manusia baik dan
manusia pragmatis. Yang berubah
adalah bentuk tantangannya.

Karena itu, perkara jilbab di Unhan
semestinya tidak dibawa terlalu jauh
menjadi perang antara kelompok
yang merasa paling Islami dan
kelompok yang dianggap tidak peduli
agama. Institusi negara mempunyai
tugas yang lebih konkret. Jika
persoalannya adalah keselamatan,
maka baktikan aspek keselamat-
annya. Jika persoalannya adalah
keseragaman, carikan desain
seragam yang tetap seragam tanpa
harus menghapus identitas
keagamaan. Jika persoalannya
adalah disiplin, ukur disiplin melalui
kepatuhan terhadap aturan,
kemampuan menjalankan tugas, dan
profesionalitas, bukan melalui ukuran
kesalehan yang tidak dapat
diverifikasi secara objektif. Klarifikasi
Kemhan bahwa aturan seragam akan
dievaluasi agar mengakomodasi
kadet perempuan berhijab justru
merupakan langkah yang lebih sehat
daripada memperpanjang perdebatan
teologis. Negara tidak perlu
menentukan apakah jilbab wajib atau
tidak; negara hanya perlu
memastikan bahwa warga negara
tidak diperlakukan diskriminatif
karena menjalankan keyakinannya.

Mungkin persoalan jilbab bukan
hanya tentang sehelai kain yang
diletakkan di atas kepala perempuan.
Ia adalah cermin tentang bagaimana
kita memahami agama, kebudayaan,
perempuan, negara, dan kebebasan.
Saya melihat sejarah memperlihatkan
bahwa busana Muslimah selalu
bergerak mengikuti zaman, tanpa
harus berarti agama kehilangan
seluruh nilai normatifnya. Karena itu,
saya tidak keberatan jika seorang
muslimah memilih berjilbab secara
ketat karena keyakinan agamanya,
sebagaimana saya juga tidak merasa
perlu menghakimi muslimah yang
memilih bentuk busana berbeda
berdasarkan pemahaman
keagamaannya. Yang saya keberatan
adalah ketika satu bentuk fashion
dipaksakan menjadi ukuran iman, lalu
ukuran iman itu dipakai untuk
menghakimi manusia.

Bagi saya, agama seharusnya
membuat manusia semakin rendah
hati dalam menilai orang lain, bukan
semakin percaya diri menjadi hakim
atas isi hati orang lain. Jangan
mengubah tafsir menjadi aturan
negara, dan jangan mengubah
fashion menjadi ukuran iman. Di
situlah mungkin kita menemukan titik
temu: bukan dengan memaksa
semua orang memiliki tafsir yang
sama, melainkan dengan memberi
ruang agar keyakinan, kebudayaan,
dan kebebasan dapat hidup berdam-
pingan secara bermartabat.*

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA

Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA

Karim Paputungan

KOMISARIS

Maria Hanief

DIREKTUR

Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA

Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan
Blok D, No.3, Kota Serang, Banten
Telephon/Fax: (0254) 407 8285

No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001
BCA -2454 061 704

(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:

WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga

JAWAB: Chandra Magga | REDAKTUR PELAKSANA: Azmart Tusnedi | REDAKTUR: Ghuroofie Dzhilliluh, Stefano, Dedi Rustandi

REPORTER: CH Widodo Haider, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Paradede | PENGEMBANGAN BISNIS: Sobar Rohmat | IKLAN: Zulfa Nadira

(Manager), Dody Fitriadi | FOTOGRAFER: Dziki Oktomaulyadi | PRA CETAK & PERWAJAHAN: Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadji | GRAFIS: Ahmad Bukhori

ACCOUNTING: Ifroh Hardianti | ADMINISTRASI KEUANGAN: Azi Abdurohman | ADMINISTRASI PAJAK: Nadia Al Vani | ADMINISTRASI: Nia Aryanti | PEMASARAN: Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :

Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2
Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :

Gedung Graha Pena, Lantai 5
Jalan Kebayoran Lama No.12,
Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :

PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN	ADVERTORIAL		IKLAN CILIK/BARIS Rp. 23.000/baris - Minimal 3 baris - Maksimum 7 baris
	Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	
Warna (FC)		: Rp. 69.000/mm kolom	
SOSIAL/KELUARGA			
Hitam Putih (BW)		: Rp. 30.500/mm kolom	
Warna (FC)		: Rp. 54.500/mm kolom	

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

PANDEGLANG, BANPOS - Bank Banten Kantor Cabang (KC) Pandeglang resmi menempati gedung baru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan nasabah. Peresmian gedung tersebut menjadi momentum bagi Bank Banten untuk memperkuat kehadirannya di Kabupaten Pandeglang.

Gedung baru Bank Banten KC Pandeglang diresmikan Wakil Gubernur Banten, Dimiyati Natakusumah, Rabu (26/8). Peresmian turut dihadiri jajaran manajemen Bank Banten, pemerintah daerah, mitra kerja, dan sejumlah tamu undangan. Dimiyati berharap keberadaan gedung baru dapat mendorong perkembangan

bisnis Bank Banten sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. "Semoga bisnis Bank Banten Cabang Pandeglang membesar dan bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat Banten," kata Dimiyati kepada wartawan.

Dalam kesempatan tersebut, Dimiyati juga menyempungkan rencana perpindahan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) dari Bank BJB ke Bank Banten. Ia mendorong adanya kerja sama antara Bank BJB dan Bank Banten, meski Pemprov Banten akan memberikan prioritas kepada Bank Banten. "Kalau sesuai Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan, maka seharusnya pay-

DLH Waspadaai Karhutla di Tengah Cuaca Panas

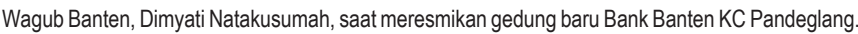
Kepala DLH Pandeglang, Rahmat Zulkita, mengatakan pihaknya bersama sejumlah instansi terkait telah mendirikan posko piket gabungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkolon. Posko tersebut untuk memperketat pengawasan sekaligus mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran. "Sudah sekitar 20 hari kami melakukan piket bersama di TPA Bangkolon. Ada Satgas Karhutla yang melibatkan DLH, kepolisian, kesehatan, BPBD, dan unsur terkait lainnya," kata Rahmat kepada wartawan, Rabu (26/8).

Sementara itu, TPA Bojong Cinar sudah tidak beroperasi sejak 2025. Adapun lokasi TPA di Cigeulis belum dioperasikan karena masih terkendala persoalan teknis dan administrasi. “TPA Bojong Cinar sudah

Dalam kesempatan tersebut, Dimiyati juga menyinggung rencana perpindahan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) dari Bank BJB ke Bank Banten. Ia mendorong adanya kerja sama antara Bank BJB dan Bank Banten, meski Pemprov Banten akan memberikan prioritas kepada Bank Banten. "Kalau sesuai Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan, maka seharusnya pay-

Menurut Dimiyati, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan Bank BJB. Ia berharap kedua bank tetap dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Banten. "Kami juga tidak mau mematikan Bank BJB. Jadi nanti tumbuh sama-sama, untung sama-sama, usaha sama-sama, dan berbuat terbaik buat masyarakat Banten," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Banten Pandeglang, Trio Adit Pamungkas, mengatakan gedung baru tidak hanya berkaitan dengan peningkatan fasilitas, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan. “Gedung baru ini merupakan wujud komitmen Bank Banten untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat Pandeglang semakin mudah mendapatkan layanan perbankan yang cepat, nyaman, dan profesional,” kata Adit.



ran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran kantor cabang yang lebih representatif diharapkan dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, pelaku usaha, peme-

rintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain meningkatkan pelayanan, Bank Banten KC Pandeglang berkomitmen menghadirkan layanan dan produk perbankan sesuai kebutuhan masya-

krakat. "Dengan semangat baru dan fasilitas yang lebih memadai, Bank Banten KC Pandeglang siap memberikan pelayanan terbaik serta terus tumbuh bersama masyarakat Pandeglang," pungkasnya. (DHE/PAY)

BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, saat memadamkan api.

PANDEGLANG, BNPOS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang mencatat 13 peristiwa kebakaran terjadi sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Kebakaran didominasi insiden di permukiman penduduk dan lahan.

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana BPBDPK Pandeglang, Yosep Mardani, mengatakan tujuh keja-

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana BPBDPK Pandeglang, Yosep Mardani, mengatakan tujuh keja-

dian kebakaran terjadi pada Juli dan enam kejadian lainnya pada Agustus. "Pada bulan Juli sebanyak tujuh peristiwa kebakaran dan pada bulan Agustus sebanyak enam peristiwa kebakaran yang didominasi

[illegible]

IKLAN LARIS BANTEN POS	Info Iklan: - 081334404392 - 087805831183 		
---	--	---	---

KEHILANGAN Telah hilang Surat AJB atas nama SUNARNI Nomor : 470/2005 Lokasi Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang Telah hilang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5379 atas nama Tasmin Bin Pinal, dengan luas tanah 244 m². Lokasi tanah di Jl. Poncol Indah Raya No. 9 RT 05/02, Kelurahan Cireundeun, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,	Provinsi Banten. HILANG BPKB, R4 NO. POL: A-257-K NOKA: MHKF MR CEJ4K 001140 AN. PEMERINTAH DAERAH HILANG BPKB, R4 NO POL: A-1473-KR HOKA: MHKMICB4JEK 036217 AN. H. SUKRI BIN SUWARTA (ALM). HILANG BPKB, R4 NO.POL: A-9236-KB	HOKA: MHMF E 74 P5JK 184005 AN. Mahajana Cahaya Juwita Thl hilang 1 Unit BPKB Nopol A 1293 HL Merk Suzuki Thn 2003, No KA MHYESJ4103J095201, No Sin F10SID197771 Thl hilang 1 unit BPKB Nopol A 1053 EA, Merk Toyota, No KA MHKE8FB3JKJ000397, No Sin 2NRF890966 Th 2019 No. BPKB P05549215H1	Thl hilang 1 Unit BPKB Nopol B 4228 BV5 Merk Yamaha Thn 2019 No Ka MH3SG4640KJ058554 No sin G3J8E0111887 Telah Hilang Sertifikat HGB no. 280301119.3.00602, Ds. Jatimulya, Rangkasbitung, L. 3080 M2. An. PT Makmur Multy Mega Mandiri Telah Hilang BPKB Mobil Suzuki Pick Up, Warna Hitam, No. Mesin: G15AID1094223, No. Rangka: MHYESL415HJ803622, No. Pol. B
--	--	---	--

9571 CAH, No. BPKP: N05408218. Tahun 2017, atas nama NURUDIN, Alamat: Batuceper RT.02/03 Batuceper Kota Tangerang Telah hilang sertifikat sebidang tanah Hak Milik SHM No 71 (28050404100071) dengan Luas 5.590 m², jalan dumpit raya, kelurahan Gandasari kecamatan jatiuwung atas nama Tjapang.	MAKANAN Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. alamat: Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053 #jejenindonesia
--	--

 WEBSITE www.banpos.co	 EMAIL iklanbantenpos@gmail.com	 TWITTER @bantenpos	 INSTAGRAM banten_pos
 FACEBOOK facebookbantenpos	 YOUTUBE Banpos Channel		

MULTATULI

Jalan Poros di Bintangsari Rusak Parah
Belum Tersentuh Perbaikan

KONDISI Jalan Poros di Desa Bintangsari menghubungkan Kampung Nyarengseng hingga Cikarae, Kecamatan Cipanas, Lebak mendapat sorotan, karena akses utama warga tersebut bertahun-tahun mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perbaikan, Rabu (26/8).

Disebutkan, kerusakan jalan dikeluhkan warga karena menghambat aktivitas dan mobilitas warga sehari-hari. Selain itu kondisi jalan yang berlubang dan rusak juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama saat musim hujan ketika permukaan jalan licin.

Warga berharap Pemerintah Desa Bintangsari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jalan tersebut. Menurut warga setempat, jalan poros desa merupakan infrastruktur vital yang digunakan setiap hari untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses pelayanan kesehatan.

"Kami berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini. Sudah bertahun-tahun kondisinya rusak, padahal jalan ini merupakan jalur utama yang dilalui warga setiap hari," ungkap Udin warga setempat.

Sementara, Kepala Desa Bintangsari, Basri kepada wartawan membenarkan bahwa kondisi jalan tersebut memprihatinkan. Pemerintah Desa mengaku telah mengusulkan perbaikan jalan kepada Pemkab maupun Pemprov.

"Benar jalan itu rusak parah, pengajuan sudah, baik ke kabupaten bahkan sudah ke provinsi, namun sampai sekarang belum ada info," ujar Basri

Kata dia, warga berharap jalan poros di Desa Bintangsari itu usulannya segera ditindaklanjuti, "Kami ingin usulan perbaikan ditindaklanjuti, demi meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas warga kami," harap Basri.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.(WDO/RUS)

LEBAK
Disorot Kejaksaan, Dewan
Bakal Evaluasi Dinkes
Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Bimtek

LEBAK, BANPOS - Komisi III DPRD Kabupaten Lebak akan mengevaluasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak. Hal itu dilakukan berkenaan dengan kasus dugaan penyelewengan anggaran yang saat ini tengah diselidiki oleh pihak kejaksaan.

"Ya nanti Komisi III dalam rapat kerja dengan mitra kerja nanti akan mengevaluasi, mempertanyakan sehingga tidak ada lagi terjadi misalnya, pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan SOP yang ada," kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Medi Juanda,

saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (26/8).

Namun, sebelum itu dirinya menghormati proses hukum yang saat ini tengah berlangsung dengan mengedepankan prinsip asas praduga tak bersalah.

Dia berharap melalui proses hukum tersebut pihak kejaksaan dapat mengungkap secara gamblang dugaan praktik lancung di lingkungan Dinkes Kabupaten Lebak.

"Jadi kita menghargai proses kalau ada hal-hal yang melanggar, silakan pihak APH juga melakukan penyelidikan. Kami juga sebagai

wakil rakyat menjalani tupoksi kami dalam pengawasan," ujar anggota Fraksi Nasdem itu.

Di samping itu Medi mendesak Kejaksaan Negeri Lebak untuk transparan dan akuntabel dalam melaksanakan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan anggaran tersebut.

Selain itu ia juga mendorong pihak kejaksaan untuk senantiasa mengikuti koridor hukum yang berlaku dalam melaksanakan proses hukum tersebut.

"Harus dilakukan secara transparan. Jadi kita menganut asas pra-

duga tak bersalah sehingga proses proses hukum ini sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.

Kemudian dia juga menekankan kepada pihak kejaksaan untuk bertindak tegas, apabila dalam kasus itu terbukti adanya pelanggaran. Jangan sampai penanganan kasus itu berhenti di proses penyelidikan tanpa adanya kejelasan.

"Kalau memang ada pelanggaran dan memang ada istilahnya melanggar aturan-aturan, ada hukum ya kita hormati proses hukum yang berjalan," tegasnya.(TQS/RUS)

Gelar Aksi Demonstrasi, Karyawan Indomaret Tolak Penghapusan Upah Lembur



Sejumlah karyawan Indomaret yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lebak menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang kantor Distribution Center (DC) PT Indomarco Prismatama Kabupaten Lebak pada Rabu (26/8). Dalam aksi itu terdapat sejumlah tuntutan yang disuarakan, salah satunya yakni tolak penghapusan upah lembur karyawan.

LEBAK, BANPOS - Sejumlah karyawan Indomaret yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lebak menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Distribution Center (DC) PT Indomarco Pratama pada Rabu (26/8). Dalam aksi tersebut setidaknya ada delapan tuntutan yang disampaikan, salah satunya yakni tolak kebijakan penghapusan upah lembur bagi para karyawan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, serikat buruh itu mulai berkumpul di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB pagi. Mereka datang dengan menggunakan mobil komando serta iring-iringan kendaraan roda dua.

Di gerbang kantor, tampak barisan personil Kepolisian serta Satuan Pengamanan (Satpam) internal PT Indomarco Pratama bersiap untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi serikat buruh tersebut. Setibanya di lokasi, massa yang sebagian besar adalah karyawan PT Indomarco Pratama atau Indomaret itu berbaris sembari mengibarkan umbul-umbul serikat pekerja.

Di atas mobil komando, beberapa orator menyampaikan aspirasi di hadapan massa aksi. Salah satu yang disoroti adalah penerapan sistem upah lembur yang dinilai tidak memanusiakan pekerja.

"Pemberian upah lembur itu satu di Hari Raya Idul Fitri di hari pertama, dan Hari Raya Idul Fitri di hari

kedua. Saya mau tanya, mau masuk atau libur?," kata salah seorang orator. Orasi itu sontak disambut teriakan 'libur' dari massa aksi.

Ditemui di sela-sela aksi demonstrasi, Ketua SPN Kabupaten Lebak, Sidik Uen, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh ada beberapa karyawan yang mengaku tidak dibayarkan upah lemburnya oleh pihak perusahaan. Selain itu pihak perusahaan juga disebut kerap menukar jatah libur karyawan secara sewenang-wenang.

Padahal, upah lembur dan jatah libur merupakan bagian dari hak para karyawan. Masalah itulah yang kemudian dipermasalahkan.

"Hak lemburnya tidak dibayarkan dan bahkan hak liburnya pun itu mereka tukar dengan begitu saja, seenaknya gitu tanpa ada sebuah kompromi tanpa ada sebuah kesepakatan bersama dengan kawan-kawan kami di sini," katanya.

Selain masalah upah lembur dan hak libur, masalah lain yang disoroti dalam aksi tersebut adalah penerapan kebijakan mutasi dan demosi yang dinilai sewenang-wenang serta sarat diskriminasi. Uen menegaskan, pihaknya sangat tidak mentolerir kebijakan tersebut.

"Dimana teman-teman kami masih ada perlakuan terhadap mutasi yang tidak jelas, demosi, serta bentuk perlakuan diskriminasi yang memang itu sangat kami tidak to-

lirer," ujarnya.

Karena itu lah dalam aksi tersebut mereka mendesak pihak perusahaan mengabulkan tuntutan para pekerja. Di antaranya tolak penghapusan upah lembur hari libur nasional dan bayarkan upah lembur pekerja tim toko, kembalikan off mingguan pekerja tim toko.

Kemudian hentikan dan batalkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang merugikan pekerja, stop intimidasi berkedok rotasi, mutasi, dan demosi kepada pekerja yang menolak kesepakatan bersama; serta bangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Uen mengancam, jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan maka pihaknya akan menggelar aksi mogok kerja besar-besaran.

"Kalau memang tidak disepakati dan tidak dikabulkan permohonan teman-teman kami, tidak menutup kemungkinan akan melakukan sebuah mogok kerja," tegasnya.

Di sela-sela aksi tersebut BANPOS sempat berusaha meminta tanggapan dari pihak manajemen DC PT Indomarco Prismatama Kabupaten Lebak. Hanya saja pihak keamanan internal tidak memperkenankan awak media masuk ke dalam menemui pihak manajemen.

Namun melalui keterangan tertulisnya, pihak manajemen perusahaan memberikan tanggapan atas

tuntutan yang disampaikan para karyawan.

Melalui surat bernomor 1051/C1.05/HRD/VIII/2026, Branch Manager PT Indomarco Prismatama Kabupaten Lebak, Charly F. Panjaitan, menjelaskan bagi karyawan yang bekerja pada hari libur nasional, pihak perusahaan akan memberikan satu hari libur tambahan bagi karyawan dan tidak mengurangi hak lainnya.

Selain itu para pekerja juga tetap akan mendapatkan off mingguan dalam periode minggu tersebut bagi karyawan yang bekerja pada hari libur nasional. "Kami jelaskan bahwa setiap karyawan yang libur pada tanggal hari libur nasional, akan tetap mendapatkan off mingguan dalam periode minggu tersebut," tegasnya sebagaimana dikutip BANPOS dari surat jawaban pihak perusahaan yang diterima pada Rabu (26/8).

Lalu berkaitan dengan penghentian serta pembatalan SKB. Charly mengatakan, penerapan surat kesepakatan tersebut berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan dari siapapun, baik pekerja maupun manajemen perusahaan.

Kemudian terkait tuduhan intimidasi berkedok rotasi mutasi dan demosi, Charly menjelaskan, pihaknya melaksanakan kebijakan tersebut berdasarkan pertimbangan kelangsungan operasional toko untuk melayani kebutuhan sehari-hari konsumen.

"Stop intimidasi berkedok rotasi mutasi dan demosi kepada para pekerja yang menolak kesepakatan bersama, dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan mutasi dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kelangsungan operasional toko untuk melayani kebutuhan sehari-hari konsumen," terangnya.

Terakhir, berkaitan dengan tuntutan membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Charly mengklaim, pihaknya telah memenuhi tuntutan tersebut dengan membuka ruang dialog bersama serika pekerja.

"Selama ini pihak manajemen selalu membuka ruang untuk dialog dengan serikat pekerja sebagaimana yang dilakukan selama ini," ucapnya.

Charly menegaskan dengan adanya penjelasan ini, pihaknya memiliki itikad baik untuk melakukan musyawarah mufakat dengan serikat pekerja dalam mencari solusi terbaik.

"Dengan adanya penjelasan ini bahwa pihak manajemen mempunyai itikad baik untuk melakukan musyawarah mufakat (bipartite) dengan pihak PSP SPN PT Indomarco Prismatama Cabang Lebak," pungkasnya.(TQS/RUS)

LEBIH MUDAH
AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL

BANTEN POS

BPM
BANPOS

DOWNLOAD SEKARANG
APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

GET IT ON
Google Play

PORTAL BERITA
E- PAPER
YouTube Channel

banpos channel www.banpos.co bantenpos@gmail.com banten_pos banten_pos

BANTEN POS

Pasang Iklan DI SINI AJA....

Info Lebih Lanjut:
081334404392 / 087808831183

banpos channel WEBSITE: www.banpos.co EMAIL: bantenpos@gmail.com INSTAGRAM: banten_pos FACEBOOK: banten_pos

Rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81

Bersih-Bersih Sampah Pantai Bagedur



Masih dalam rangka HUT yang ke-81, Danramil 0313/Malingping Kapt (Inf) Lili Warli, memimpin Bakti Teritorial Prima di Pantai Bagedur, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Rabu (26/8).

BAKSEL, BANPOS - Masih dalam rangka HUT yang ke-81, Danramil 0313/Malingping Kapt (Inf) Lili Warli, memimpin Bakti Teritorial Prima di Pantai Bagedur, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Rabu (26/8).

Giat Bakti Teritorial Prima berupa pembersihan sampah pantai khususnya di wilayah Kodim 0603/Lebak, itu adalah bukti kepedulian TNI menjaga lingkungan untuk Indonesia bersih dan lestari.

Danramil 0313/Malingping, Kapt Lili Warli mengatakan giat Bakti Teritorial Prima berupa pembersihan Pantai Bagedur, agar para pengunjung pantai merasa nyaman.

"Momen ini sengaja kami ambil

dan diprioritaskan di area pantai, dan kami bersama Forkopimcam Malingping berharap siapapun yang berkunjung ke tempat wisata ini, jika tempatnya bersih pengunjung merasa nyaman," ujarnya.

Kata Lili W, dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI, tidak hanya melaksanakan Bakti Teritorial Prima berupa pembersihan pantai secara bersama-sama saja, akan tetapi pihaknya (TNI) selaku anak kandung rakyat, betul-betul ingin menanamkan rasa kebersamaan, kekompakan, keharmonisan di dalam warga dan keluarga khususnya di Malingping.

"Untuk diketahui, Malingping itu punya kami, Malingping itu punya kalian, Malingping itu punya kita

semua. Untuk itu, mari kita jaga bersama-sama," ungkapnya.

Diketahuinya, pada Kegiatan Bakti Teritorial Prima TNI tersebut dihadiri dari Koramil Banjarsari, Gunung Kencana, Cileles, Panggarangan dan juga Personel TNI dari Pos AL Muara Binuangeun, Satgas Marinir Pulau Terluar (Puter) Pulau Deli, Polsek Malingping, Satpol PP Kecamatan Malingping, Korwil BPP Malingping.

Juga hadir Bediler Malingping Shooting Club (BMS), Perbakin Lebak, Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN), PMI, Pramuka dari SMKN 1 Malingping, Sibernet, Ormas JBB, Masyarakat Kecamatan Malingping dan yang lainnya.(WDO/RUS)

TOTAL SPORT

Odekta Kejar Rekor

Atlet Maraton Siap Pensiun

JAKARTA, BANPOS - Atlet lari maraton putri kebanggaan Indonesia, Odekta Elvina Naibaho, bertekad mempertahankan momentum performa emasnya secara konsisten. Ia mengusung ambisi sangat besar dalam upayanya mempertajam rekor waktu berlarnya pada ajang bergengsi Asian Games Aichi-Nagoya 2026 mendatang. Perlombaan akbar tersebut rencananya akan diselenggarakan secara resmi di negara Jepang mulai 19 September hingga 4 Oktober.

Pencapaian hebat sang atlet belakangan ini memang terus menunjukkan sebuah tren peningkatan kualitas performa yang sangat impresif. Dirinya baru saja sukses memecahkan rekor nasional lari maraton putri pada ajang elite Gold Coast Marathon 2025 di Australia. Catatan waktu berlarnya sanggup menembus angka 2 jam 31 menit 34 detik untuk melampaui rekor terdahulu.

“Tentu, sebagai seorang atlet itu ada ambisi, egonya itu selalu ada. Pasti ada,” kata Odekta.

Torehan sejarah fenomenal sebelumnya mampu dipegang tangguh oleh atlet Triyaningsih dengan rekam laju waktu 2 jam 31 menit 39 detik. Prestasi olahraga puncak tersebut telah bertahan kokoh selama rentang 14 hingga 15 tahun tanpa pernah sekalipun terkalahkan. Keberhasilan memecahkan rekor nasional ini jelas menjadi modal psikologis penting bagi kesiapannya menantang dunia.

Pemantapan stamina fisik sang pahlawan lintasan kini terus digeber maksimal lewat pemusatan latihan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ia menyebut persiapan teknis dirinya bersama



para pelatih ahli saat ini telah berhasil menyentuh angka 80 persen. Wanita hebat ini memanfaatkan berbagai kompetisi lari resmi sebagai ajang kalibrasi vital untuk mengukur batasan performanya. “Untuk target (pada Asian Games

2026), saya memberikan yang terbaik, yang pasti,” tegas Odekta. Ketatnya peta persaingan medali di Jepang telah disadari oleh pelari Filipina serta pelari negara Bahrain. Tantangan super berat ini membuat sang pelari maraton menatap

kuat menjadi penantang tangguh yang sangat sulit ditaklukkan. Hadir pula ancaman nyata dari deretan atlet naturalisasi unggulan Jepang serta pelari negara Bahrain. Tantangan super berat ini membuat sang pelari maraton menatap

kompetisi mendatang dengan sangat realistis. Ia lebih memfokuskan diri untuk mendongkrak peringkat kesepuluhnya di ajang Asian Games Hangzhou silam. Pasca turnamen akbar tersebut usai, dirinya siap memutuskan gantung sepatu jika ia

menemukan sosok pendamping hidup. “Ya, kalau saya ketemu jodoh (pasangan hidup), ya, mungkin (Asian Games 2026) ini yang terakhir,” selorohnya mengakhiri cerita. (ANT/AZM)

Trackhouse MotoGP Resmi Rekrut Enea Bastianini

JAKARTA, BANPOS - Perhelatan ajang balap bergengsi MotoGP musim 2027 dipastikan akan menghadirkan banyak kejutan besar bagi audiens balapan. Susunan pembalap utama pada seluruh tim peserta kini telah mengalami perombakan strategi secara masif.

Tim Trackhouse secara resmi mendaftarkan Enea Bastianini dengan Raul Fernandez untuk memperkuat formasi terbaru mereka. Kepastian susunan pembalap ini menjadikan Trackhouse sebagai tim keenam yang telah merampungkan semua kontrak.

“Saya sangat antusias bergabung dengan Superfile Trackhouse MotoGP Team untuk dua musim MotoGP,” ujar Bastianini.

Pembalap tangguh tersebut mendapatkan jaminan kontrak panjang yang akan terus berlaku hingga musim balapan 2028. Ia kini bersiap menghadapi berbagai regulasi baru terkait pengurangan kapasitas mesin serta pengujian aerodinamika.

Bos Trackhouse Entertainment Group, Justin Marks, sangat meyakini rekrutan barunya akan memberikan dampak positif. Kehadiran pembalap sarat pengalaman tersebut diharapkan mampu mendongkrak daya saing tim dalam perebutan juara.

“Kami akan senang memburu trofi dan menciptakan momen-momen mengesankan dalam beberapa tahun ke depan bersama Enea, Raul,” kata Marks.

Perombakan susunan pembalap utama tersebut terjadi secara beruntun pada area garasi pabrik Red Bull KTM. Skuat raksasa tersebut kini dipastikan tidak akan diperkuat lagi oleh sosok Maverick Vinales dan Enea Bastianini.

Manajer Red Bull KTM, Nicolas Goyon, saat ini menaruh fokus penuh pada penanganan proses pemulihan cedera bagian bahu Vinales. Peran sang pembalap utama untuk sementara waktu terpaksa harus digantikan sepenuhnya oleh sosok tangguh Pol Espargaro.

“Setelah berdiskusi dengan Maverick dan KTM, kami mengambil keputusan Pol akan melanjutkan balapan dengan kami di Aragon,” ucap Goyon.

Pol Espargaro kembali diturunkan sebagai pengisi posisi cadangan setelah dirinya sukses mencetak raih dua poin penting di Sirkuit Silverstone. Penampilannya dinilai sangat menjanjikan untuk mengisi kekosongan kursi balap pada seri lintasan berikutnya.

Pihak manajemen tim tersebut masih terus menaruh harapan besar terhadap jaminan kesembuhan fisik Vinales agar kembali pulih bugar. Mereka menginginkan pembalap itu segera mengaspal dalam Grand Prix San Marino di lintasan utama Sirkuit Misano.

“Kami akan selalu mendukungnya selama proses pemulihan dan berharap bisa menyambutnya lagi di Misano,” pun-g-kas Goyon. (ANT/AZM)

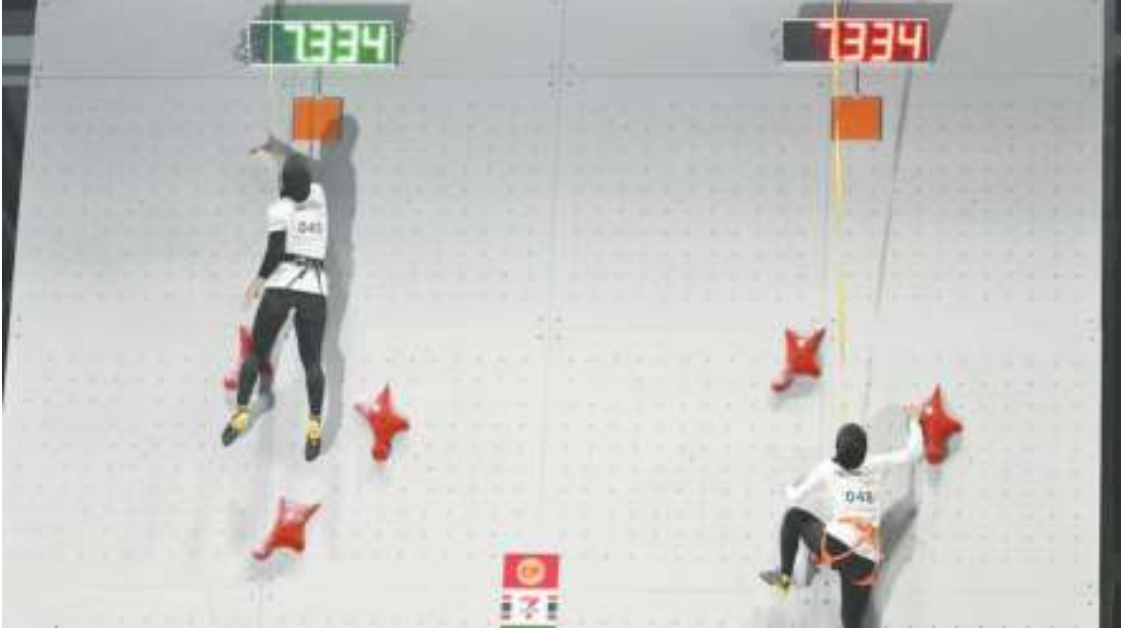


Timnas Panjat Tebing Indonesia Sabet Perunggu

GUIYANG, BANPOS - Laga unggul ditunjukkan perwakilan kontingen timnas panjat tebing Indonesia pada kancah internasional kompetisi bergengsi World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026. Kejuaraan olahraga tingkat benua yang mempertemukan para pemanjat muda berbakat ini diselenggarakan secara resmi sejak 21 hingga 25 Agustus. Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia secara mantap memberangkatkan 13 atlet tangguh demi berlaga maksimal pada turnamen ketat ini.

Delegasi kebanggaan bangsa tersebut mendelegasikan sebanyak enam atlet putra hebat serta tujuh putri dengan keahlian memanjat yang sangat mumpuni. Seluruhnya dikirimkan untuk bersaing keras memperebutkan gelar kejuaraan pada disiplin speed, lead, dan boulder bagi kategori kelompok usia U17 dan U19. Pelatih pendamping timnas panjat tebing Indonesia, Judistiro, memimpin penuh perjuangan pasukannya hingga sukses merebut dua medali perunggu bernilai pada hari Selasa.

“Tentu saja kami ingin membawa pulang medali emas, tetapi perunggu merupakan hasil terbaik sekaligus menjadi penanda kami harus banyak berbenah,” ujar sang pelatih Judistiro.



Torehan keberhasilan gemilang medali pertama sukses diamankan melalui performa sangat solid nomor kompetisi beregu speed relay putri bagi klasifikasi rentang umur di bawah 17 tahun. Pasangan andalan tangguh Naura Jasmine Rayya Syafiq bersama Keyzia Queenme Candley Riwo membuktikan kualitas nyata mereka dengan menundukkan regu perwakilan tuan negara Korea Selatan. Keduanya

tampil sangat memukau menorehkan penyelesaian catatan waktu kegemilangan 18,81 detik, sementara kompetitor tertinggal di posisi belakang dengan perolehan torehan waktu lambat 19,29 detik.

Status kampiun peraih medali emas serta perak pada kejuaraan putri tersebut pada akhirnya diborong penuh oleh dominasi mutlak kekuatan skuad perwakilan tuan rumah China. Kepingan medali pe-

runggu kedua sukses diamankan secara luar biasa oleh pasangan putra Haddan Malik Baqmuhyibar dan Amirul Rizqi Febriyansah pada pertarungan kompetisi speed relay U19. Duet Haddan bersama Amirul berhasil mencatatkan waktu gemilang 11,09 detik guna menundukkan perlawanan maut Kazakhstan yang menorehkan 11,27 detik, menyusul kampiun utama China serta Korea Selatan. (ANT/AZM)

Pemusatan Latihan Nasional Tennis Meja Dipersiapkan

JAKARTA, BANPOS - Persiapan pemusatan latihan nasional tenis meja menuju ajang bergengsi Asian Games 2026 Aichi-Nagoya Jepang selalu dioptimalkan secara komprehensif oleh elemen utama kepengurusan federasi.

Pihak penyelenggara sangat teliti sekaligus serius mengevaluasi tingkat kesiapan taktis maupun ketahanan fisik seluruh anggota tim kontingen perwakilan negara menjelang perhelatan turnamen skala global tersebut. Rangkaian program pelatihan khusus yang intensif tersebut sungguh diharapkan mampu mendulang banyak raih prestasi gemilang bagi kelestarian sejarah harum bidang olahraga tenis meja tanah air.

Pemusatan latihan bagi para atlet kebanggaan ini difokuskan pada kawasan kompleks olahraga strategis Simprug demi menjamin kenyamanan serta kelancaran rutinitas seluruh peserta terpilih.

Ketua Umum Indonesia Ping-

pong League, Petrus Reinhard Golose, secara aktif mendampingi sekaligus mengawasi seluruh tahapan pematangan persiapan skuad menuju arena pertandingan internasional sesungguhnya. Ia memastikan ketersediaan sarana maupun prasarana mutakhir telah diisagakan dengan standar pengawasan yang amat ketat demi menunjang potensi performa maksimal seluruh pahlawan olahraga. “Menyiapkan atlet-atlet itu tidak gampang, mereka harus siap secara fisik, mental, kemudian terbiasa menghadapi lawan yang kuat, sehingga sering bertanding adalah latihan yang terbaik,” katanya.

Rangkaian kompetisi berjenjang terus digulirkan secara teratur demi senantiasa mengasah ketajaman kemampuan teknis serta merangsang insting bertanding seluruh pemain kebanggaan. Turnamen tersebut senantiasa dioptimalkan sebagai sarana peningkatan kualitas performa seluruh peserta sebelum mereka diterjunkan ke arena pertempuran kancah dunia seutuhnya. Ajang bergengsi ini



Ketua Umum Indonesia Pingpong League, Petrus Reinhard Golose.

sangat diharapkan sanggup mematahkan ketahanan mental para punggawa sebelum mereka berani menantang agresivitas lawan tangguh dari negara lain.

Tim utama pelatnas secara resmi dipastikan akan selalu diperkuat oleh gabungan istimewa 10 perwakilan talenta muda maupun para atlet tangguh.

Sekretaris Jenderal IPL, Yon Mar-diyono, senantiasa merawat ke-

seimbangan porsi susunan kelompok usia dalam kontingen. Langkah strategis ini senantiasa diusung demi memuluskan lajunya proses regenerasi tanpa mengorbankan kualitas kejayaan tim.

“Kami (Pengurus IPL) bahkan berencana menyelenggarakan Kejuaraan WTT di Bali pada tahun 2027, dengan Jakarta juga menjadi salah satu opsi lokasi penyelenggaraan,” ujarnya. (ANT/AZM)



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

Dewan Ingatkan OPD Taat Regulasi di Tengah Maraknya OTT

CILEGON, BANPOS - DPRD Kota Cilegon mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih tertib dalam menjalankan program dan mengelola anggaran. Imbauan tersebut disampaikan di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di berbagai daerah.

Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, meminta setiap program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai regulasi, mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan penting untuk mencegah persoalan hukum dan administrasi. "Sebenarnya dari awal kita sudah mengimbau bahwa kesesuaian antara RPJMD dan RKPD secara sistematis harus sesuai. Kemudian, dari segi terealisasi juga harus ada pengawasan," ujar Rizki, Rabu (26/8).

Ia menegaskan, pelaksanaan teknis program memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Na-

mun, seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. "Kita mengimbau harus sesuai dengan regulasi yang ada, terutama di barang dan jasa dan segala macam," katanya.

Rizki juga meminta OPD tidak mengabaikan saran dan masukan dari aparat penegak hukum (APH), termasuk pendampingan dari Kejaksaan. Setiap rekomendasi yang diberikan, kata dia, harus diperhatikan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. "Setiap saran dan masukan dari APH, Kejaksaan, atau KPK harus dilakukan," tuturnya.

Selain pencegahan, DPRD juga meminta OPD segera menyelesaikan setiap catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diberikan batas waktu penyelesaian. "Kalau itu menjadi catatan dari BPK dan sudah diberikan waktu supaya diselesaikan, tinggal diselesaikan saja

oleh masing-masing OPD," ujarnya.

Rizki mengatakan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah terus dilakukan melalui berbagai mekanisme. Di antaranya rapat dengan pendapat (RDP), memanggil OPD, serta monitoring langsung ke lapangan. "Rutin juga di DPRD, terutama tindak lanjut dari LHP BPK, itu sudah berjalan sampai hari ini," ucapnya.

Sejumlah OPD, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kata Rizki, cukup sering diminta penjelasan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan. "Terkait perkembangan tindak lanjut catatan BPK, termasuk pengembalian apabila terdapat rekomendasi, silahkan dikonfirmasi lebih lanjut kepada Inspektorat (Kota Cilegon)," pungkasnya. (CR03/PAY)



Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, mengatakan gencarnya OTT menuntut OPD patuh regulasi, Rabu (26/8)



Pelepasan PCNU Cilegon menuju Muktamar ke-35, Rabu (26/8) di Mapolres Cilegon.

PCNU Cilegon Ramaikan Muktamar Ke-35

CILEGON, BANPOS - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon turut menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Rombongan PCNU Cilegon berangkat secara bertahap menggunakan sejumlah moda transportasi, mulai dari pesawat, kendaraan pribadi, sepeda motor, hingga bus. Sebagian peserta telah berangkat sehari sebelumnya, sementara rombongan lainnya menyusul pada Rabu (26/8) pagi.

Ketua PCNU Cilegon juga telah berangkat lebih dahulu menggunakan pesawat. Ketua Rombongan Muktamar ke-35 PCNU Cilegon, Subhi, mengatakan kehadiran mereka di Jombang merupakan bentuk dukungan sekaligus bagian dari syiar NU. "Kita dalam rangka syiar, karena bagaimana pun NU ini hajat kita nasional. Tentunya kita di sana

ramaikan," ujar Subhi.

Subhi menegaskan, rombongan PCNU Cilegon tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam muktamar. Menurutnya, kewenangan tersebut berada pada pimpinan atau pihak yang memiliki hak suara dalam forum. "Kami di sana hanya menghadiri saja, artinya tidak memiliki kapasitas pernyataan itu. Itu ranahnya pimpinan yang memiliki hak suara," katanya.

Ia menilai kehadiran warga NU dari berbagai daerah penting untuk menyemarakkan pelaksanaan Muktamar ke-35 sekaligus memperkuat syiar organisasi. Subhi berharap muktamar yang digelar secara nasional tersebut dapat menghasilkan keputusan yang membawa NU semakin baik dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga NU lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan umat," tuturnya. (CR03/PAY)

Dividen PT PCM Naik, Operasional Perusahaan Tetap Harus Dijaga

CILEGON, BANPOS - Target peningkatan dividen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) kepada Pemerintah Kota Cilegon dinilai perlu diimbangi dengan kemampuan perusahaan menjaga kebutuhan operasional. Peningkatan setoran dividen jangan sampai mengurangi ruang perusahaan untuk mengembangkan bisnis.

Komisaris PT PCM, Ratu Ati Marliati, mengatakan dividen merupakan salah satu indikator kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Namun, kebutuhan operasional harus menjadi pertimbangan sebelum menentukan besaran dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah. "Kita berharap seperti itu, tapi perlu proses. Jangan sampai dividen kita ter-

lalu tinggi, tetapi beberapa hal untuk alokasi operasional harus diperhatikan," ujar Ratu Ati usai menghadiri pelantikan Perbasi Cilegon di Aula DPRD Cilegon, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kondisi PT PCM saat ini cukup baik, terutama dari sisi pendapatan dan pangsa pasar. Kondisi tersebut menjadi modal bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Setelah ibu masuk cukup bagus terkait dengan pendapatan terutama, kemudian pangsa pasar dalam bisnis cukup bagus," katanya.

Ratu Ati mengatakan berbagai peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan te-

tap akan didorong. Namun, pengembangan usaha harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan perusahaan. "Hari ini sudah berkantor sudah cukup bagus, dividen naik dari tahun ke tahun. Apa yang nanti ada peluang bisnis sifatnya akan kita dorong," tuturnya.

Ratu Ati yang baru menjalankan tugas sebagai Komisaris PT PCM kurang dari satu bulan mengaku masih melakukan pembahasan bersama jajaran perusahaan untuk menentukan prioritas pengembangan ke depan. "Ibu belum ham-pir satu bulan, masih diskusi dan mana yang akan menjadi prioritas," ucapnya.

Sebagai komisaris, ia me-

negaskan tugasnya tidak berada pada ranah operasional perusahaan. Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memastikan rencana yang disusun direksi dapat berjalan sesuai target. "Kami akan tetap mengawal beberapa yang sudah disusun oleh direksi dan para divisi itu cukup bagus," ungkapnya.

Ia berharap komitmen Wali Kota Cilegon untuk memperkuat kinerja PT PCM dapat direalisasikan. Menurutnya, peningkatan pendapatan, pengembangan bisnis, dan kontribusi dividen kepada daerah harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. "Harapan kita ke depan janji yang per-nah dilakukan oleh Pak Wali bisa terealisasi juga," pungkasnya. (CR03/PAY)



Komisaris PT PCM, Ratu Ati Marliati, targetkan peningkatan dividen, Senin (24/8).

Di Lahan Pemda dan BUMN

14 Gerai KKMP Cilegon Rampung Dibangun



Diskusi terkait Koperasi Merah Putih, Rabu (26/8).

CILEGON, BANPOS - Pembangunan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Cilegon terus berjalan. Dari 36 gerai yang dibangun, sebanyak 14 gerai telah rampung, sementara 22 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM) Kota Cilegon, Suhendi, mengatakan progres pembangunan tersebut berdasarkan laporan akhir dari Kodim. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pembangunan setiap gerai berjalan sesuai rencana. "Dinkop itu dapat info dari kelurahan. Kita konfirmasi ke bagian aset, bisa dibangun. Jadi semua bangunan itu prosesnya didampingi TNI," ujar Suhendi, Rabu (26/8).

Menurut Suhendi, pembangunan gerai koperasi memanfaatkan sejumlah lahan milik pemerintah daerah dan badan usaha milik negara (BUMN). Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan usulan pemerintah kelurahan yang kemudian diverifikasi bersama bagian aset. "Biasanya titik itu di aset lingkungan pemerintah dan yang lebih tahu itu lurah. Kemudian dikoordinasikan ke bagian aset BPKAD. Kedua, lahan milik BUMN," katanya.

Sejumlah lahan milik BUMN yang dimanfaatkan berada di kawasan PT Krakatau Steel, di antaranya di Kotabumi, Krenceng, dan Kubangsari. Dinkop dan UKM memastikan lokasi yang dipilih tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui proses koordinasi untuk memastikan status

dan kelayakan lahan.

Suhendi menambahkan, lokasi gerai diupayakan berada di kawasan yang dekat dengan permukiman dan aktivitas masyarakat. Hal tersebut agar keberadaan koperasi mudah dijangkau serta dapat memberikan manfaat bagi warga. "Titik-titik itu di Cilegon alhamdulillah tidak ada di tengah gunung atau tengah sawah. Rata-rata masih ada di tengah lingkungan masyarakat," tuturnya.

Dengan 14 gerai telah rampung dan 22 lainnya masih dikerjakan, Pemkot Cilegon terus memantau proses pembangunan KKMP. Selain mengejar penyelesaian fisik, pemerintah juga memastikan pemanfaatan lahan dan keberadaan gerai dapat mendukung aktivitas koperasi di tingkat kelurahan. (CR03/PAY)



PENDANGKALAN KALI AKIBAT KEMARAU.
Nelayan membersihkan jaring usai melaut di kali yang mulai surut di Lingkungan Gang Eceng, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Rabu (26/8). Kemarau panjang membuat aliran air di kali tersebut surut sehingga membuat para nelayan kesulitan ketika hendak melaut.

Keberadaan Kafe Mampu Dongkrak Penerimaan Pajak

SERANG, BANPOS – Pertumbuhan usaha kuliner, mulai dari rumah makan hingga kafe baru, menjadi salah satu sektor yang dibidik Pemerintah Kota Serang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sepanjang 2026.

Bapenda Kota Serang memperluas pendataan terhadap wajib pajak (WP) baru, terutama pelaku usaha kuliner yang baru beroperasi maupun tengah ramai dikenal masyarakat.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bapenda Kota Serang Dede Kurnia mengatakan, sejumlah sektor pajak turut menopang penerimaan daerah, di antaranya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk makan dan minum, pajak tenaga listrik, serta pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Untuk BPHTB, realisasinya hingga semester pertama 2026 tercatat sekitar Rp22 miliar. Untuk PBJT dari pajak makan dan minum juga ikut bertumbuh seiring bertambahnya rumah makan, kafe, dan usaha kuliner baru di Kota Serang,” katanya,

Rabu (26/8).

Menurut Dede, bertambahnya usaha kuliner membuat sektor tersebut menjadi salah satu sasaran intensifikasi pendataan Bapenda. Petugas diterjunkan untuk mendata usaha-usaha baru yang mulai beroperasi di sejumlah wilayah Kota Serang.

“Sekarang ini kan banyak kafe-kafe baru yang buka, rumah makan dan kuliner. Petugas kami sekarang juga sedang mendata itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendataan tidak hanya menyasar rumah makan atau restoran yang telah lama beroperasi, tetapi juga kafe-kafe baru yang tengah menjadi tren dan dikenal luas oleh masyarakat.

“Misalnya rumah makan baru, kami data dulu. Kafe-kafe yang sifatnya baru, kekinian dan viral juga didata sehingga menambah jumlah wajib pajak. Yang sudah ada juga dilakukan pemasangan alat perekam data,” tuturnya.

Selain memperluas basis wajib pajak, Bapenda juga melakukan pengawasan transaksi

BACA KEBERADAAN HAL-8

Taji Pemprov Diuji

Sanksi Langsung Perusahaan Tambang

SERANG, BANPOS – Langkah tegas Pemprov Banten kini siap diuji dengan menjatuhkan sanksi langsung perusahaan tambang nakal. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi apik bersama Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan. Mereka sepakat memperketat pengawasan jam operasional di seluruh wilayah secara serentak.

Kepala Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan rencana tersebut. Pihaknya merespons cepat berbagai keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban lalu lintas. Penindakan akan difokuskan langsung pada pusat hulu kegiatan pertambangan.

“Pada saat ada yang mengeluarkan surat jalan di jam operasional tambang, kita akan berikan teguran, kita akan berikan sanksi,”

tegasnya, Rabu (26/8).

Ari merencanakan pemanggilan seluruh pengusaha tambang guna penegasan aturan main. Evaluasi menyeluruh terkait kepatuhan regulasi jam operasional angkutan terus dilakukan secara intensif. Satgas juga gencar menutup paksa operasional berbagai tambang ilegal tanpa izin.

Dinas tersebut baru saja merampungkan evaluasi ketat terhadap

239 perusahaan tambang. Penilaian itu mencakup tahapan eksplorasi hingga proses penjualan hasil produksi. Hasilnya menunjukkan kelayakan operasional dari sebagian besar entitas bisnis.

“Saat ini yang berstatus operasi produksi ada 160 izin,” kata Ari.

Perusahaan resmi tersebut tersebar secara merata di sejumlah kawasan kabupaten strategis. Titik

BACA TAJI HAL-8

Pemkot Gandeng PT Brata Wijaya Bangun Gedung Parkir

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang tengah mematangkan rencana kerja sama dengan PT Brata Wijaya Banten untuk pembangunan gedung parkir di kawasan Pasar Lama dan Jalan Juhdi.

Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Serang mengatasi keterbatasan fasilitas parkir, khususnya setelah kawasan Royal Baroe dan sejumlah ruas di sekitarnya mulai ditata dengan pembatasan parkir di badan jalan.

Sekda Kota Serang, Nanang

Saefudin, mengatakan rencana kerja sama tersebut muncul karena Pemkot Serang belum memiliki kemampuan anggaran untuk membangun gedung parkir secara mandiri yang membutuhkan investasi cukup besar.

“Secara APBD kita belum mampu menyiapkan gedung-gedung parkir yang notabene dibangun puluhan miliar. Sehingga kita bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT Brata Wijaya Banten,” kata Nanang.

Menurutnya, pembangunan akan dilakukan di dua lokasi, yakni kawasan Pasar Lama dan Jalan Juhdi. Nantinya, gedung yang dibangun tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat parkir, tetapi juga dapat dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang.

“Bukan hanya parkir saja. Di situ ada gerai-gerai, misalnya ada pelaku UMKM, ada tempat pertemuan yang skala kecil, ada padel mungkin di situ. Sehingga nanti satu sisi kita mengurai keterbatasan

an parkir,” ujarnya.

Nanang menegaskan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan perlu melalui sejumlah kajian sebelum kerja sama direalisasikan. Salah satunya berkaitan dengan aspek hukum agar kebijakan yang nantinya dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain aspek hukum, Pemkot Serang juga akan mempertimbangkan aspek sosial, terutama berkaitan dengan rencana penataan kawasan Jalan Juhdi.

Pasalnya, Pemkot Serang berencana memindahkan SMP Negeri 4 Kota Serang dari lokasi tersebut ke kawasan Ciracas. Pemindahan itu

BACA PEMKOT HAL-8

Agis Bidik Bumi Perkemahan Berbudi

SERANG, BANPOS – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Serang terus mendorong penguatan pembinaan generasi muda melalui program yang lebih berorientasi pada karya dan keberlanjutan. Salah satu target yang tengah didorong adalah pembangunan Bumi Perkemahan Berbudi.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan fasilitas tersebut nantinya diarahkan menjadi ruang pembinaan generasi muda yang dapat digunakan untuk pendidikan, pengembangan keterampilan, kreativitas hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Nur Agis, tantangan Gerakan Pramuka saat ini bukan sekadar mempertahankan kegiatan yang sudah berjalan, tetapi memastikan organisasi tersebut tetap relevan dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter sekaligus keterampilan.

“Pramuka Kota Serang harus te-



rus bergerak. Dari gugus depan, kwartir ranting hingga kwartir cabang, kita bangun pembinaan yang semakin kuat, kegiatan yang semakin berkualitas, serta kader-

kader yang siap menjadi generasi penerus bangsa,” kata Agis saat Upacara Hari Pramuka ke-65 tingkat Kwarcab di Lapangan Puspemkot, Rabu (26/8).

Ia menilai momentum Hari Pramuka ke-65 harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret. Terlebih, tema tahun ini yakni Berkreasi,

BACA AGIS HAL-8

LEBIH MUDAH
AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL
BANTEN POS

BP
BANPOS

DOWNLOAD SEKARANG
APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

GET IT ON
Google Play

PORTAL BERITA
E-PAPER
YouTube Channel



Taji Pemprov...

Sambungan dari Halaman 7

konsentrasi pertambangan terbanyak berada pada wilayah Lebak dan Kabupaten Serang. Kabupaten Pandeglang menyusul sebagai daerah dengan sebaran izin pertambangan.

Setiap entitas bisnis diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan administrasi maupun teknis. Kewajiban itu mencakup pelaporan hasil produksi rutin serta pelaksanaan reklamasi lingkungan. Pemerintah berhak menajutahkan denda administratifhingga sanksi penghentian aktivitas.

“Penutupan sementara ini berlaku sampai perusahaan tersebut melaksanakan kewajibannya sesuai temuan Satgas di lapangan,” tegasnya.

Wakil Gubernur Banten, A Dimiyati Natakusumah, turut menyoroti dengan sangat serius permasalahan polusi akibat aktivitas pengangkutan material pasir. Ia secara terbuka menyatakan berencana mengevaluasi status moratorium perizinan tambang pada masa depan. Truk pengangkut material ini dituding sebagai biang kerok utama kerusakan badan jalan.

Ceceran lumpur tanah liat tersebut sering membuat aspal menjadi sangat kotor serta sa-

ngat membahayakan pengendara motor. Tonase muatan kendaraan yang kerap melebihi batas toleransi maksimal juga semakin mempercepat laju kehancuran infrastruktur. Dimiyati menegaskan urusan penilangan sepenuhnya masuk yurisdiksi pihak aparat kepolisian.

“Nah, maka angkutan tambang ini harus betul-betul bagaimana mengikuti aturan prosedur,” ujar Dimiyati.

Pemerintah daerah hanya berwenang mengecek masa berlaku kelayakan uji kendaraan berat. Dinas Perhubungan ditugaskan memantau kelengkapan dokumen surat izin sah seluruh armada pengangkut. Sinergi sinambung lintas instansi ini diharapkan sanggup menekan angka kecelakaan lalu lintas harian.

Masyarakat diimbau selalu proaktif melaporkan dugaan indikasi pelanggaran waktu operasional truk armada tambang. Partisipasi publik ini sangat krusial dalam membantu kelancaran tugas pengawasan seluruh aparat. Ketegasan sanksi diyakini mampu menciptakan situasi operasional usaha pertambangan yang tertib.

“Tugas kami adalah betul-betul melihat KIR yang ada,” tandasnya.(MPD/AZM)

Keberadaan Kafe...

Sambungan dari Halaman 7

melalui pemasangan alat perekam data seperti tapping box pada sejumlah usaha restoran dan perhotelan.

Pemasangan alat tersebut dilakukan untuk merekam transaksi secara lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam penghitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.

Di sisi lain, Bapenda juga terus melakukan pemeriksaan dan intensifikasi terhadap wajib pajak yang telah terdaftar. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya mencari dan mendata potensi wajib pajak baru.

Sementara itu, sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga semester pertama 2026 tercatat telah mencapai sekitar Rp21,7 miliar dari target Rp51 miliar.

“Untuk PBB, dari target Rp51 miliar sudah tercapai sekitar 30,5 persen, nominalnya Rp21,7 miliar,” ucapnya.

Dede menyebut capaian PBB-P2 tersebut turut didukung berbagai kebijakan keringanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya berupa diskon pembayaran PBB bagi wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bapenda memberikan potong-

an pembayaran PBB sebesar 10 persen pada periode Januari hingga Maret 2026 dan 5 persen pada April hingga Juni.

Selain itu, Pemerintah Kota Serang juga memberikan pembebasan denda PBB selama Agustus 2026 sebagai kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya.

Meski demikian, Dede mengingatkan agar kebijakan keringanan pajak tidak menjadi alasan masyarakat menunda pembayaran dengan harapan akan kembali muncul program pengampunan pada periode berikutnya.

“Yang kami khawatirkan kalau kebiasaannya memberikan pengampunan pajak, ada moral hazard. Masyarakat bisa menunda pembayaran dan menunggu program lagi, jadi pembayaran pajaknya justru menunggak,” ujarnya.

Untuk mendorong kepatuhan, Bapenda Kota Serang ke depan berencana mengubah pola pemberian insentif dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya.

“Rencananya tahun depan memberikan reward kepada yang patuh atau taat. Jadi bukan yang tidak taat yang diberikan reward,” ucapnya.(CR02/AZM)

Pemkab Genjot Literasi Cetak Pelajar Unggul Berdaya

SERANG, BANPOS - Pemerintah Kabupaten Serang secara serius perkuat budaya literasi lewat bedah buku bagi para murid. Langkah strategis ini secara spesifik menargetkan kalangan pelajar tingkat menengah di berbagai zona. Tujuan utamanya adalah demi mencetak sumber daya manusia yang unggul serta senantiasa berdaya saing.

Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diselaraskan dengan kebiasaan membaca. Pejabat daerah ini menuntut sinergi yang solid antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah bersama para penggiat literasi.

“Kolaborasi ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam literasi membaca dan menulis,” kata Najib. “Semoga melalui kegiatan ini banyak yang termotivasi untuk semangat belajar agar kelak lahir SDM unggul di Kabupaten Serang,” imbuhnya.

Kegiatan bernilai edukatif tersebut mengusung agenda acara bedah buku bergengsi bertajuk The Great Student. Perhelatan spesial ini diinisiasi secara mandiri oleh lembaga pendidikan terkemuka bernama Rumah Prestasi. Acara ini melibatkan partisipasi aktif puluhan pelajar terpilih dari jenjang SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Kepala DPKD Kabupaten Se-

rang, Rahmat Fitriadi, memberikan sanjungan atas terobosan penyediaan ruang pengembangan kapasitas generasi muda tersebut. Ia meyakini bahwa proses pembelajaran para murid terus menggali potensi terbaik diri masing-masing melalui rutinitas membaca setiap harinya.

Mujang berharap karyanya tersebut sanggup mendorong perbaikan kapasitas intelektual kawula muda secara konsisten. Pemahaman literasi mendalam dinilai sebagai bekal utama demi memenangkan persaingan masa depan yang sangat kejam. Generasi tangguh ini makin diharapkan siap memimpin roda kemajuan peradaban Serang.(CR02/AZM)

Pemkot Gandeng...

Sambungan dari Halaman 7

dinilai perlu dikaji mengingat kawasan Jalan Juhdi ke depan akan semakin ramai dengan aktivitas bisnis dan parkir.

“Di situ kan sudah ada keramaian segala macam. Apakah masih layak atau tidak anak-anak sekolah di situ?” kata Nanang.

Ia mengatakan, rencana pemindahan sekolah tersebut juga harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak, terutama orang tua siswa dan komite sekolah.

“Rencana sih baru diletakkan di Ciracas, yang sekarang dipakai kantor dinas pendidikan. Di situ nanti juga ada gedung SMP. Tapi tentu ini juga harus kita komunikasikan dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama para orang tua wali murid melalui komite sekolah,” jelasnya.

Sementara itu, Satgas Percepatan Pembangunan Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan hasil ekspose bersama PT Brata Wijaya

Banten akan ditindaklanjuti melalui rapat internal dengan Sekda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Insyaallah nanti kami akan tindak lanjuti melalui rapat internal dengan Pak Sekda, dengan dinas terkait berkaitan dengan mekanisme atas hasil permohonan yang disampaikan dari PT Brata,” ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, rencana pembangunan gedung parkir tersebut berkaitan dengan penataan kawasan Pasar Lama. Pasar tradisional yang saat ini berada di lokasi tersebut direncanakan dipindahkan ke kawasan Pasar Kepandean.

“Yang dipindahkan itu pasar tradisionalnya. Kita pindahkan ke Pasar Kepandean. Jadi jangan terlalu banyak pasar. Pasar Kepandean kita pindahkan, nanti di situ dibuat gedung parkir,” katanya.

Menurut Wahyu, penataan tersebut juga disesuaikan dengan pola tata ruang Kota Serang ke depan, di mana kawasan Pasar Lama

diarahkan menjadi salah satu kawasan bisnis.

Adapun skema kerja sama yang ditawarkan menggunakan pola Bangun Guna Serah (BGS). Lahan tetap merupakan aset pemerintah daerah, sedangkan pembangunan gedung akan dilakukan oleh pihak swasta.

“Lahannya milik pemerintah daerah, nanti gedungnya dibangun oleh PT Brata,” kata Wahyu.

Di sisi lain, Komisaris PT Brata Wijaya Banten, Maman Suherman, mengatakan pihaknya masih harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum rencana pembangunan dapat dinyatakan final.

“Belum sepenuhnya sekarang ini deal. Jadi ada beberapa tahapan lagi yang kita akan ketemu dan pihak internal dari pemerintahan akan rapat kembali,” kata Maman.

Ia menyebut salah satu tahapan yang masih harus dilakukan adalah sosialisasi serta pendataan dan pengukuran luasan lahan di kawasan Pasar Lama.

“Ada beberapa persyaratan, untuk sosialisasi itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pasar Lama juga harus tahu wilayah itu berapa meter, berapa ribu seperti itu,” ujarnya.

Maman juga menegaskan, nilai investasi untuk pembangunan di Jalan Juhdi maupun Pasar Lama masih dalam tahap penghitungan ulang sehingga belum dapat dipastikan.

“Nilainya akan dihitung ulang kembali, karena kemarin ada pengkajian kembali tentang luasnya,” katanya.

Ia mengatakan fokus utama PT Brata Wijaya Banten dalam rencana tersebut adalah pembangunan fasilitas parkir. Namun, sejumlah fasilitas pendukung masih terbuka untuk dibahas dalam proses penyusunan kerja sama.

“Kalau PT itu sebenarnya parkir saja. Parkir mungkin ada juga nanti yang akan didukung fasilitas lain, tapi itu kita lagi dibicarakan juga,” tandasnya.(CR02/AZM)

Agis Bidik...

Sambungan dari Halaman 7

Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan dinilai memiliki keterkaitan dengan kebutuhan generasi muda saat ini.

Gerakan Pramuka, lanjutnya, harus menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar dan mengembangkan kemampuan, sekaligus ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Nur Agis menegaskan, keberadaan fasilitas Bumi Perkemahan tersebut diharapkan dapat mem-

berikan ruang yang lebih luas bagi proses pembinaan anggota Pramuka.

“Bumi Perkemahan Berbudi bukan sekadar tempat berkemah. Kita ingin menjadikannya sebagai pusat pendidikan dan pengabdian generasi muda Kota Serang,” ujarnya.

Untuk merealisasikannya, Kwarda Kota Serang menyadari pembangunan ruang yang hidup dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi muda.

“Hari ini kita menyampaikan harapan. Besok kita mulai dengan langkah. Dan pada waktunya, kita ingin melihat Bumi Perkemahan

bagai mitra Gerakan Pramuka.

“Kami menyadari bahwa cita-cita besar ini tidak mungkin diwujudkan oleh satu atau dua orang. Ini adalah ikhtiar kita bersama,” tuturnya.

Nur Agis berharap Bumi Perkemahan Berbudi nantinya tidak berhenti sebagai proyek pembangunan fasilitas, melainkan benar-benar menjadi ruang yang hidup dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi muda.

“Hari ini kita menyampaikan harapan. Besok kita mulai dengan langkah. Dan pada waktunya, kita ingin melihat Bumi Perkemahan

Berbudi benar-benar berdiri sebagai karya nyata,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh jajaran Pramuka di Kota Serang memperkuat pembinaan dan memperluas pengabdian, sehingga keberadaan Gerakan Pramuka dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat.

“Mari kita bergerak bersama. Kita bangun Pramuka Kota Serang yang kuat, mandiri, berkarakter, dan berbudi. Dan mari kita wujudkan Bumi Perkemahan Berbudi sebagai bukti bahwa cita-cita yang kita tanam hari ini dapat menjadi kenyataan di kemudian hari,” pungkasnya.(CR02/AZM)

Ratusan Warga...

Sambungan dari Halaman 1

“Data sih sekarang kita megang keberangkatan total 10 bus. Itu kolektif ya, dari masyarakat, mahasiswa, dan teman-teman yang lainnya. Nah, untuk jumlah massa, dari Banten sendiri sebetulnya secara kolektif itu sampai 500 orang,” ujarnya.

Toriq menjelaskan, jumlah tersebut masih dapat berubah lantaran keberangkatan masyarakat tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh pihak koalisi. Sebagian peserta juga disebut memilih berangkat secara mandiri.

Untuk isu yang dibawa, massa Banten tidak hanya mengikuti tuntutan yang berkembang dalam aksi di tingkat nasional. Mereka juga menyiapkan sejumlah persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Pertama memang isu regional terkait proyek PIK-2, yang memang dirasa hari ini masih banyak permasalahan dan berdampak kepada masyarakat. Tentu kami meminta untuk diberhentikan. Yang kedua, terkait tambang-tambang ilegal yang ada di Banten. Nah, dua isu pokok itu yang dari regional kita bawa,” ujar Toriq.

Sementara untuk isu nasional, massa Banten juga akan membawa sejumlah persoalan lain yang berkembang dalam agenda aksi di

Jakarta. Terkait rencana pengamanan perjalanan massa, Toriq mengaku memahami tugas aparat untuk menjaga ketertiban. Namun, ia berharap pengawasan tidak berubah menjadi tindakan yang menghambat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

“Kita memang bukan hanya di Tangerang membahas terkait pemblokadean. Bahkan dari teman-teman Jawa Barat pun, ada informasi terkait pemblokadean,” katanya.

Ia menyebut terdapat informasi mengenai potensi pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik yang dikhawatirkan dapat membuat massa tertahan dalam perjalanan menuju Jakarta. Meski demikian, Toriq menegaskan pihaknya tidak memperlmasalahan pengawasan sepanjang dilakukan untuk menjaga keamanan.

“Saya rasa memang hal itu jadi salah satu tugas pengamanan dari aparat untuk menjaga ketertiban. Cuman saya rasa dari aparat pengamanan tidak ada provokatif, tidak ada berusaha untuk memanfaatkan teman-teman untuk menyorakan suaranya,” ujarnya.

Toriq mengatakan, keberangkatan massa dari Banten dijadwalkan berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Peserta yang menggunakan kendaraan umum maupun bus akan berkumpul di sejumlah titik sebelum melan-

jutkan perjalanan menuju Jakarta.

Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kasi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Laksono Febrianto mengatakan, kepolisian juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi keterlibatan pelajar dalam aksi.

Hal tersebut dilakukan sebagai evaluasi dari kejadian sebelumnya ketika terdapat pelajar yang ikut dalam aksi dan menjadi korban.

“Kita kan lakukan kejadian tahun kemarin kembali. Kita kecolongan, tiba-tiba itu anak sekolah ikut aksi jadi korban,” kata Tri saat dihubungi BANPOS dalam panggilan telepon.

Menurutnya, kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk mencegah pelajar terlibat dalam aksi yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Sementara terhadap massa aksi, kepolisian menegaskan pendekatan yang dilakukan adalah pelayanan dan pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman.

“Prinsipnya Polresta Tangerang itu memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan besok dapat berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif,

tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujarnya.

Pada bagian lain, Polres Lebak juga secara mengimbau seluruh warga, khususnya kalangan pelajar tingkat menengah atas (SLTA), agar tidak ikut serta dalam aksi tersebut guna menghindari resiko provokasi dan gangguan keamanan. Kasi Humas Polres Lebak, Iptu Moestafa Ibnu Syafir, menyatakan, pengawasan terhadap kelompok pelajar menjadi prioritas karena usia mereka dinilai masih labil. Polisi mengkhawatirkan para pelajar hanya ikut-ikutan tanpa memahami substansi aspirasi yang sedang diperjuangkan.

“Kami mengimbau warga Kabupaten Lebak, terutama anak-anak tingkat SLTA atau SMA, untuk tidak mengikuti atau terlibat dalam kegiatan unjuk rasa tersebut demi menjaga keselamatan dan ketertiban bersama. Anak-anak tingkat SMA masih labil dan mudah terprovokasi. Mereka sering tidak tahu apa yang harus disuarakan, hanya ikut kalau ada orang bawa batu atau maju,” ujar Moestafa pada Rabu (26/8).

Selain fokus pada pelajar, Moestafa juga meminta masyarakat umum untuk tetap tenang dan tidak mudah terhasut oleh informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Menurut-nya, penggunaan telepon seluler

Infrastruktur Dikejar...

Sambungan dari Halaman 1

teknis, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga kependidikan.

Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, PPPK dari berbagai profesi pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sebagai aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, pihaknya menilai kebijakan mengenai peningkatan status dan pengembangan karier seharusnya tidak membedakan latar belakang profesi.

“Setelah kemarin pemerintah mengumumkan bahwa hanya PPPK guru yang diakomodir ke penuh waktu dan diberi kesempatan untuk jadi PNS, maka kami tenaga teknis dan nakes serta tenaga kependidikan menuntut adanya kesetaraan perlakuan, bukan hanya tenaga guru,” kata Taufik, Rabu, (26/8).

Menurutnya, tuntutan tersebut bukan untuk mempertentangkan PPPK guru dengan PPPK non-guru. Persoalan utamanya adalah

PNS Pemprov...

Sambungan dari Halaman 1

Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026. Sementara Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak secara tegas mendesak Tim Kejagung memeriksa dugaan keterlibatan oknum di daerah terkait dugaan korupsi MBG.

Pemeriksaan dilakukan penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terhadap dua orang saksi pada Jumat (21/8). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan, salah satu saksi yang diperiksa merupakan PNS pada salah satu dinas di Provinsi Banten. Sementara saksi lainnya berasal dari unsur yaysan.

“Pertama, YS selaku PNS pada Dinas Provinsi Banten dan AR dari Yayasan PAN,” kata Anang.

Menurut Anang, pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG. Namun, Kejagung tidak merinci materi pemeriksaan maupun hubungan YS dengan perkara yang tengah disidik. Penyidik juga belum membeberkan konstruksi lengkap dugaan penyimpangan, termasuk besaran kerugian negara dalam perkara tersebut.

“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pem-

Menjaga Asa...

Sambungan dari Halaman 1

ajang berburu trofi belaka. Lomba Sekolah Sehat adalah pijakan awal untuk menyemai budaya hidup sehat yang berakar kuat di dada para siswa.

Nilai-nilai kebersihan, kedisiplinan, hingga semangat gotong royong terwujud secara nyata dalam keseharian SMAN 8 Pandeglang. Sekolah ini mengintegrasikan Trias UKS yang mencakup edukasi kesehatan, pelayanan dasar, serta pembinaan lingkungan

memastikan seluruh PPPK memperoleh hak dan kesempatan yang setara, termasuk bagi mereka yang saat ini masih berstatus PPPK paruh waktu.

“Harapan kami, saat ini kami sama-sama ASN dan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diangkat PNS juga dan kawan-kawan paruh waktu non-guru juga ingin diberi kesempatan menjadi penuh waktu,” katanya.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, AP3KI Banten bakal mengkonsolidasikan PPPK non-guru dari berbagai kabupaten dan kota untuk mengikuti aksi di Senayan, Jakarta, pada 7 September 2026 mendatang.

Taufik mengatakan, sekitar 8.000 PPPK non-guru dari Banten yang terdiri atas tenaga teknis, nakes hingga tenaga kependidikan sementara ini masuk dalam pendataan peserta aksi. Namun, angka tersebut masih dapat berubah karena proses koordinasi di tingkat kabupaten dan kota masih berlangsung. “Kurang lebih ada 8.000

berkas dalam perkara dimaksud,” ujarnya.

Pemeriksaan terhadap PNS Pemprov Banten tersebut juga menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Namun, hingga saat ini BKD mengaku belum menerima informasi resmi dari Kejagung mengenai pemeriksaan tersebut. Kepala BKD Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya pemeriksaan tersebut dari pemberitaan media massa.

“Sampai dengan saat ini sih belum ada informasi secara resmi yang tersurat dari Kejagung ke kami ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasil dari pemeriksaan Kejagung,” kata Ai.

Ai menjelaskan, secara administrasi kepegawaian, ASN yang mendapatkan panggilan untuk menjadi saksi dari aparat penegak hukum tetap wajib memenuhi panggilan tersebut. Apabila surat pemanggilan diterima langsung oleh ASN bersangkutan, pegawai wajib melaporkan dan menyerahkan salinan surat tersebut kepada atasan langsung serta unit kepegawaian di instansinya.

Selanjutnya, instansi atau atasan langsung dapat menerbitkan surat tugas bagi ASN untuk menghadiri pemeriksaan sesuai tanggal dan waktu yang tercantum dalam surat panggilan. “Kalau secara administrasi kepegawaian, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipanggil untuk menjadi saksi, baik oleh Kejaksaan, Kepolisian, maupun Pengadilan, wajib memenuhi

saat ini sangat rentan disalahgunakan untuk menyebarkan kabar bohong atau hoaks yang bertujuan memancing amarah massa.

Pihak kepolisian menegaskan tidak melarang warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, penyampaian aspirasi tersebut wajib dilakukan secara damai, tertib, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

“Kalau memang murni untuk menyampaikan aspirasi sampai dengan damai, dengan tertib, tidak ada merusak, tidak ada anari. Ya, kalau bisa sih kalau memang belum jelas informasinya nggak usah ikut-ikutan,” ucapnya.

Pada bagian lain, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Mathla’ul Anwar (DPP HIM-MA) menyoroti pemblokiran rekening milik aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. Ketua DPP HIM-MA Ahmad Syafaat menilai, pemblokiran rekening aktivis dengan tujuan membatasi atau menggalkan aksi demonstrasi merupakan tindakan yang perlu dipertanyakan, terlebih jika tidak disertai dasar hukum dan prosedur yang jelas.

“Pembekuan rekening milik aktivis AMPB dengan tujuan membatasi atau menggalkan aksi demonstrasi merupakan bentuk pembatasan hak yang tidak dibe-

seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Data ini masih proses koordinasi, bisa berkurang, bisa bertambah,” ujarnya.

Konsolidasi tersebut, kata Taufik, juga dilakukan bersama jaringan PPPK dari berbagai daerah di Indonesia. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyatukan sikap sekaligus merumuskan tuntutan yang akan dibawa dalam aksi kepada pemerintah pusat.

Dalam aksi tersebut, Taufik menyampaikan jika PPPK non-guru akan menyuarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta pemerintah mengangkat PPPK paruh waktu dari seluruh profesi menjadi PPPK penuh waktu pada 2026.

Mereka juga meminta agar PPPK dari seluruh profesi dapat diangkat menjadi PNS tanpa memandang usia pada 2027. Selain itu, pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026 turut menjadi tuntutan yang akan disuarakan.

Tuntutan lainnya yakni mengalihkan sumber pembiayaan gaji ASN PPPK dari Anggaran Penda-

narkan,” kata Ahmad Syafaat, Rabu (26/8).

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, kritik maupun aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat tidak semestinya dihambat melalui tindakan yang dapat membatasi hak tersebut.

Diketahui, peristiwa bermula pada Jumat (21/8), ketika Supriyono bersama warga Pati berada di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi. Saat itu, rekening yang digunakan untuk menyimpan dana pribadi dan donasi masyarakat disebut tidak dapat digunakan.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin menjelaskan, kepolisian telah rampung melakukan penelusuran terhadap rekening yang berisi dana hasil penggalangan untuk unjuk rasa masyarakat Pati tersebut,

“Kami sudah memperoleh fakta hukum dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan donasi dan rekening yang bersangkutan ... selanjutnya, terhadap penundaan rekening tersebut dapat dijalankan kembali dan kembali menjadi kewenangan dari Bank Mandiri,” ujar Iman.(ANT/MYU/CR02/TQS/ENK)

patan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tuntutan kami jelas: angkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk semua profesi, teknis, nakes dan guru pada tahun 2026. Kemudian, angkat PPPK semua profesi tanpa memandang usia untuk menjadi PNS pada tahun 2027. Lalu, realisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada tahun 2026. Terakhir, alihkan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN,” ujar Taufik.

Terkait rencana perubahan sumber pembiayaan gaji, Taufik mengakui jika terdapat kekhawatiran di kalangan PPPK mengenai dampaknya terhadap tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan kesejahteraan yang selama ini diterima. “Jelas kekhawatiran ada mengingat anggaran TPP kesejahteraan akan berkurang, tapi setidaknya harapan kami PPPK se-Indonesia ingin ada kebijakan yang sama dengan teman-teman guru,” tandasnya.(MPD/ENK)

jeratan hukum.

“Hari ini kami mendorong Kejaksaan Agung beserta jajarannya untuk melakukan pemeriksaan yang komprehensif, transparan, dan berani mengusut aliran dugaan jual beli titik lokasi dapur MBG. Jangan sampai proses penegakan hukum ini terkesan menutup mata atau berhenti pada tingkat pemeriksaan saksi saja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS pada Rabu (26/8).

Sebagai bentuk pengawasan publik yang lebih konkret, HMI MPO Cabang Lebak kini tengah mengonsolidasikan rencana aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak. Langkah ini diambil untuk mendesak aparat penegak hukum di tingkat daerah agar lebih responsif, independen, dan bersinergi secara berjenjang dengan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung.

Rizki mewanti-wanti agar jajaran korps adhyaksa tetap memegang teguh independensi tanpa bisa diintervensi oleh kelompok atau oknum tertentu. Menurutnya, akuntabilitas dalam pengusutan kasus MBG ini sangat krusial agar program negara yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tersebut tidak menjadi bancakan oknum tidak bertanggung jawab.

“Lembaga hukum harus berdiri independen dan akuntabel. Jangan ada kompromi atau praktik intervensi dalam penegakan hukum kasus MBG ini, demi memastikan program negara ini benar-benar bersih dan sampai kepada masyarakat,” pungkasnya.(TQS/MPD/ENK)

“Saya berharap berbagai kebiasaan yang telah diterapkan di sekolah dapat terus dilakukan oleh siswa sehingga lingkungan sekolah turut membentuk karakter positif pada diri mereka,” ungkap Elly.

Saat kunjungan berakhir, semangot gotong royong yang terpancar dari para siswa dan guru menjadi sinyal optimistis. SMAN 8 Pandeglang tidak sekadar bersolek demi nilai lomba, tetapi sedang mene-nun masa depan Banten yang lebih sehat dan berdaya saing dari balik tembok sekolah.(ENK)

Edukasi Kesehatan Inklusif

SADARI Ceria Bantu Remaja Berkebutuhan Khusus

BEKASI, BANPOS - LSPR Institute of Communication and Business berhasil mengembangkan program edukasi kesehatan bernama SADARI Ceria. Pendekatan inovatif ini menghadirkan media komunikasi visual mutakhir berbasis AI bagi remaja berkebutuhan khusus. Inovasi medis tersebut dirancang khusus untuk mendeteksi potensi penyakit mematikan kanker payudara sejak usia dini. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat LSPR, Yolanda Stellarosa, turun tangan langsung memper-

kenalkan program berharga ini. Pihaknya sengaja menyederhanakan ragam informasi kompleks agar sama sekali tidak menimbulkan rasa takut berlebihan. “AI Video Peraga dan pictogram membantu menerjemahkan informasi tersebut menjadi pesan yang lebih mudah dipahami dan digunakan kembali oleh para pendamping,” kata Yolanda. Sosialisasi program luar biasa tersebut dilaksanakan terpusat pada fasilitas sosial bernama Rumah Autis di wilayah Bekasi. Sebanyak lima puluh peserta antusias meliputi anak spesial, orang tua, serta pendamping aktif hadir di lokasi sana. Kehadiran seluruh elemen masyarakat membuktikan

besarnya dukungan nyata publik terhadap inisiasi penyelenggaraan layanan pendidikan sadar kesehatan jasmani. Pendanaan proyek bernilai ini bersumber langsung dari dana hibah resmi milik Kementerian Pendidikan Tinggi. Perwakilan Rumah Autis, Istie, menyoroti besarnya manfaat pengadaan media animasi canggih bagi proses pendampingan harian. Visualisasi konkret itu dinilai sangat suportif untuk membantu menyebarkan

informasi krusial ihwal kesehatan masyarakat. “Video animasi mudah dipahami dan dapat ditonton berulang,” jelas Istie kepada pewarta. Peserta pelatihan terus diajak berdiskusi merumuskan taktik penyampaian pesan medis bernada positif bagi para pasien. Bahasa sederhana wajib senantiasa digunakan menyesuaikan tingkat pemahaman memori para penerima pesan di tempat tersebut. Pelatih handal memandu jalannya diskusi interaktif demi memastikan tercapainya target luhur pengabdian kepada masyarakat. Penggunaan teknologi visual

diakui sangat berhasil menghapus stigma menakutkan saat melakukan sesi pemeriksaan fisik payudara mandiri secara komprehensif. Yolanda kembali menekankan kuat betapa pentingnya urgensi penerapan metode komunikasi inklusif di hadapan seluruh peserta program seminar interaktif tersebut. Evaluasi akhir langsung dinilai. “SADARI Ceria kami kembangkan bukan hanya sebagai materi edukasi mengenai Periksa Payudara Sendiri, tetapi sebagai pendekatan komunikasi kesehatan yang lebih inklusif,” pungkas Yolanda. (ANT/AZM)



SADARI Ceria kami kembangkan bukan hanya sebagai materi edukasi mengenai Periksa Payudara Sendiri, tetapi sebagai pendekatan komunikasi kesehatan yang lebih inklusif.

Yolanda Stellarosa

Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat LSPR



ISTIMEWA

Registrasi Kartu Seluler Wajib Biometrik Wajah

JAKARTA, BANPOS - Pemerintah menetapkan aturan tegas terkait prosedur pendaftaran kartu SIM prabayar baru bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital kini hanya mengandalkan metode verifikasi biometrik wajah terdaftar. Langkah mutlak ini terintegrasi langsung dengan sistem data kependudukan nasional. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi, Dany Suwardany, memastikan kebijakan ini berjalan ketat. Ia menegaskan tidak ada lagi operator seluler yang melayani pendaftaran menggunakan nomor induk kependudukan. Penggunaan kartu keluarga sebagai syarat administrasi juga resmi dilarang secara total. “Sejak diberlakukannya registrasi biometrik secara penuh, registrasi menggunakan NIK dan nomor KK secara otomatis ditutup secara permanen oleh Dukcapil,” kata Dany. Pemerintah sengaja menutup total akses verifikasi lama

demi menutup celah kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Selama hampir dua bulan penerapan nasional, sistem baru ini diklaim berjalan tanpa kendala berarti. Warga usia tujuh belas tahun ke atas dilaporkan berhasil melakukan registrasi secara mulus. Keberhasilan implementasi tersebut mendorong pemerintah untuk segera memperluas cakupan layanan teknologi pemindaian ini. Saat ini, pendaftaran bagi anak di bawah umur masih harus diwakilkan oleh wali sah. Oleh karena itu, sistem biometrik mandiri bagi kalangan remaja sedang dikembangkan secara intensif. “Saat ini opsel (operator seluler) sudah tidak bisa mengakomodir masyarakat yang menggunakan mekanisme konvensional tersebut,” tegas Dany. Regulasi ketat ini bermula dari tahap uji coba sejak bulan Juli tahun lalu. Landasan hukumnya tertuang resmi dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Ekosistem Digital Nomor 55 Tahun 2025. Kebijakan vital tersebut akhirnya diterapkan secara serentak berskala nasional pada tanggal 01 Juli 2026. Kementerian mencatat lonjakan angka pendaftaran kartu baru yang sangat fantastis melalui adopsi teknologi mutakhir tersebut. Sebanyak 19.669.890 nomor perdana tercatat telah berhasil diverifikasi secara langsung oleh pemiliknya. Fakta lapangan ini membuktikan keandalan penuh proses validasi identitas digital. (ANT/AZM)



ISTIMEWA/ANTARA

Sekretaris Steering Committee Muktamar Ke-35 NU Profesor Mohammad Nuh di Jombang, Jawa Timur, Selasa (25/8/2026). PBNU akan menggelar Muktamar Ke-35 pada 27-31 Agustus 2026.

PBNU Terapkan Sistem Keamanan Muktamar Digital

JOMBANG, BANPOS - Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tahun ini di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, dipastikan akan berlangsung dengan sistem keamanan super ketat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara resmi mengumumkan pemanfaatan teknologi verifikasi digital tingkat tinggi bagi seluruh peserta muktamar. Para peserta forum tertinggi ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut diwajibkan menggunakan kartu identitas khusus yang telah ditanamkan teknologi cip mutakhir. Sistem pengaturan akses masuk otomatis ini dirancang secara spesifik guna memverifikasi kepesertaan. Inovasi tata kelola berbasis digital ini dipercaya mampu mencegah segala bentuk manipulasi akses secara efektif.

“Mulai dari kepesertaan itu semuanya sudah kita verifikasi. Model-model kepesertaan ini sudah kita siapkan. Sudah pakai cip, sudah paten, sehingga dengan demikian enggak bisa dimanipulasi,” kata Sekretaris Steering Committee, Mohammad Nuh. Setiap keping kartu peserta tersebut rupanya telah dikonfigurasi berdasarkan tingkatan wilayah wewenang akses masing-masing pemegangnya. Pemegang tanda pengenalan itu hanya diizinkan memasuki zona area utama persidangan sesuai batasan hak yang dimilikinya. Sistem penyaringan elektronik ini menjadi langkah strategis panitia untuk meminimalkan potensi sengketa peserta gelap di lokasi acara. Pemanfaatan teknologi tidak berhenti hanya pada perangkat keras kartu elektronik peserta, melainkan diperluas hingga

pemantauan visual. Panitia pelaksana telah mengerahkan ratusan unit sistem kamera pengawas yang terhubung langsung dengan ruang pusat kendali terpadu. Radius pengawasan perangkat pintar ini diproyeksikan menjangkau lokasi sidang, akomodasi, hingga rute perjalanan sekitar lokasi pondok pesantren. “Ini hal yang baru dalam penyelenggaraan muktamar. Kita bisa mengetahui semua yang terjadi di arena utama, mulai tempat persidangan, tower, akomodasi, konsumsi maupun di jalan-jalan,” ujar Ketua Panitia, Saifullah Yusuf. Panitia penyelenggara juga menyelesaikan tahapan krusial verifikasi daftar pemilihan tetap (DPT) tingkat pusat maupun wilayah cabang. Tercatat sebanyak 557 perwakilan

pemilih dari seluruh kawasan telah memenuhi syarat validasi guna menentukan arah organisasi. Persentase tingkat kehadiran perwakilan pengurus ini telah melampaui ambang batas kuorum pelaksanaan rapat secara memuaskan. Isu yang beredar seputar pengunduran diri Menteri Agama Nasaruddin Umar demi posisi Ketua Umum PBNU langsung ditepis keras. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, membantah klaim spekulatif tersebut. Rumor manuver politik Menag diyakini hanyalah hoaks tak berdasar yang sengaja disebarluaskan oleh pihak tak bertanggung jawab. “Pak Menag tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Sumber informasi yang dikutip tidak jelas. Jadi kabar itu hoaks,” tegas Thobib. (ANT/AZM)

RALAT PENGUMUMAN

Menunjuk Pengumuman Lelang Kedua melalui Harian Banten Pos pada Tanggal 18 Agustus 2026, dengan ini Kami sampaikan ralat sebagai berikut :

Tertulis :

Sebidang tanah seluas 225 m2 sesuai dengan bukti kepemilikan SHM No. 350/Harjati Tgl 29/11/1995 an Suherlina di Perumahan Griya Serdang Indah Blok E-7 No.1 Desa Harjati Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Seharusnya :

Sebidang tanah seluas 225 m2 sesuai dengan bukti kepemilikan SHM No. 350/Harjati Tgl 29/11/1995 an Suherlina di Perumahan Griya Serdang Indah Blok E-7 No.1 Desa Harjati Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten (dlh. Provinsi Jawa Barat).

Ralat ini menjadi satu kesatuan dengan pengumuman lelang tersebut di atas sebelumnya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2026

Ttd

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Divisi Retail Collection & Recovery/Region Office 14

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 14 Branch Cilegon, akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan jenis penawaran lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet (*open bidding*) dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/KPKNL Serang terhadap agunan debitur an AGUS SUGIYANTO berupa

Sebidang tanah dengan luas : 90 M2, sesuai dengan SHM No. 3493/CIWEDUS, Tanggal. 18/08/2017, an AGUS SUGIYANTO, berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat diatasnya yang terletak di : Perumahan Bumi Rakata Asri Cluster Rakata Green Hill Blok D 1 No.12 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten.

• (Nilai Limit Lelang : Rp 306.300.000,- & Uang Jaminan : Rp 61.500.000,-)

Keterangan :

- Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*virtual account*) harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan.
- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 14 Branch Cilegon di nomor telepon : 085180656553 an Wilfredo Josua, 085920137817 An Junaidi, 081293102279 M Imroni & di No (0254) 216361 KPKNL Serang.

Persyaratan lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Barang dijual dalam kondisi apa adanya (*as is*). Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridikal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tuntutan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditunjuk sebagai pembeli.

Pelaksanaan lelang :

Hari & Tanggal	: Kamis, 10 September 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 10 September 2026, 11:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Serang
Penetapan Pemenang	: Jalan Raya Serang-Cilegon Km.3 Legok Serang Ruang Lelang
Batas Waktu Pelunasan	: Setelah Batas Akhir Penawaran
Bea Lelang Pembeli	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi pembeli dinyatakan wanprestasi uang jaminan disetor ke kas negara
	: 2% (dua persen) dari harga terbentuk lelang

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2026

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
Divisi Retail Collection & Recovery Region 14

BNI

KPKNL SERANG

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 14 Branch Cilegon, akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan jenis penawaran lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet (*open bidding*) dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/KPKNL Serang terhadap agunan debitur an ROMDAN berupa

Sebidang tanah dengan luas : 90 M2, sesuai dengan SHM No. 3688/CIWEDUS, Tanggal. 26/02/2019 an ROMDAN, berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat diatasnya yang terletak di : Perumahan Bumi Rakata Asri Cluster Rakata Green Valley Blok I 3 No. 02 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten.

• (Nilai Limit Lelang : Rp 309.800.000,- & Uang Jaminan : Rp 62.000.000,-)

Keterangan :

- Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*virtual account*) harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan.
- Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 14 Branch Cilegon di nomor telepon : 085180656553 an Wilfredo Josua, 085920137817 An Junaidi, 081293102279 M Imroni & di No (0254) 216361 KPKNL Serang.

Persyaratan lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Barang dijual dalam kondisi apa adanya (*as is*). Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridikal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tuntutan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditunjuk sebagai pembeli.

Pelaksanaan lelang :

Hari & Tanggal	: Kamis, 10 September 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 10 September 2026, 11:45 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Serang
Penetapan Pemenang	: Jalan Raya Serang-Cilegon Km.3 Legok Serang Ruang Lelang
Batas Waktu Pelunasan	: Setelah Batas Akhir Penawaran
Bea Lelang Pembeli	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi pembeli dinyatakan wanprestasi uang jaminan disetor ke kas negara
	: 2% (dua persen) dari harga terbentuk lelang

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2026

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
Divisi Retail Collection & Recovery Region 14

BNI

KPKNL SERANG

LEBIH MUDAH

AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL

BANTEN POS

DOWNLOAD SEKARANG

APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

2024

Google Play

PORTAL BERITA

E- PAPER

YouTube Channel

BANTEN POS

CALON SERBA BANTEN: GUCIN KAMU DAN RUMAH

EKONOMI

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026

DPKP Tangerang Kembangkan Sistem Tabel Padi untuk Petani



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menko: Perluasan Ekosistem Ritel ke Desa Perkuat Perdagangan Domestik

JAKARTA, BANPOS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perluasan jangkauan ekosistem ritel hingga ke wilayah pedesaan merupakan salah satu langkah penguatan perdagangan domestik.

“Presiden (Prabowo Subianto) juga mendorong agar ritel ini tidak hanya di kota-kota besar ataupun di urban, tetapi masuk juga di pedesaan,” kata Menko Airlangga dalam pembukaan Indonesia Retail Summit and Expo (IRSE) 2026 di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Rabu (26/8).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah pun mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut.

Menurutnya, hal itu diharapkan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan ritel dapat semakin luas sekaligus membuka jalur pemasaran bagi produk yang dihasilkan masyarakat daerah.

“Oleh karena itu, pemerintah mendorong Koperasi Merah Putih agar barang ritel yang disubsidi pemerintah juga bisa tersedia di lapangan. Sekaligus mempunyai tugas sebagai agen untuk membeli barang-barang hasil pertanian ataupun perikanan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Namun, Menko Airlangga juga

menyoroti pentingnya transfer pengetahuan (knowledge transfer) antara peritel seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), dengan pelaku usaha di daerah agar roda perekonomian di desa bisa berputar dengan lebih modern.

“Dan dari sini tentu saya mohon agar Hippindo juga bisa membantu dalam bentuk pelatihan dan yang lain agar mereka bisa mengembangkan dengan sistem digital yang setara dengan ritel-ritel modern terutama untuk mengakses barang-barang kebutuhan yang non subsidi ataupun non dikelola oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan integrasi antara ritel dan produksi dalam negeri juga menjadi bagian penting dalam transformasi perdagangan.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga terus mendorong agar peningkatan aktivitas perdagangan tidak hanya memperkuat sisi konsumsi, tetapi sekaligus menciptakan permintaan bagi barang yang diproduksi di dalam negeri.

“Dan terus pemerintah mendorong sinergi antara ritel, dan harapannya tentu barang yang didorong di ritel itu juga barang yang diproduksi di dalam negeri,” kata Menko Airlangga. (ANT/RUS)

TANGERANG, BANPOS - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mengembangkan sistem tabur benih langsung (tabela) untuk membantu modernisasi pertanian di daerahnya tersebut.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono di Tangerang, Rabu (26/8) mengatakan bahwa pengembangan sistem ini terlebih dahulu dilakukan uji coba pada lahan Demonstration Plot (Demplot) milik Kelompok Tani Klebet Pabuaran di Desa Klebet, Kecamatan Kemiri sebagai bagian dari upaya peningkatan budidaya pertanian daerah.

"DPKP selaku pelaksana program menginisiasi penanaman padi sawah varietas Ciherang di lahan seluas satu hektare, bekerja sama dengan Pemerintah Desa Klebet serta Penyuluh Pertanian setempat," jelasnya.

Dia menjelaskan, penanaman padi melalui sistem tabela di area demplot tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran (TA) 2026.

Selain itu, langkah tersebut juga bagian dari upaya mendukung penerapan Pertanian Modern-Advances Agricultural System (PM-AAS). Pasalnya, penerapan teknologi alat tanam tabela menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi bercocok tanam.

"Dengan sistem tanam benih langsung ini, petani dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, sekaligus meningkatkan hasil produksi demi mewujudkan pertanian

A man with grey hair, wearing a tan police uniform, is speaking outdoors. He is standing in front of a building with columns and a parked motorcycle. A black car is partially visible on the right.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono.

yang lebih modern dan berdaya saing," tutur dia.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Tangerang, Abdul Munir menjelaskan bahwa demplot ini dapat menjadi sarana percontohan budidaya pertanian yang baik bagi masyarakat maupun kelompok tani dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

"Penanaman padi sawah melalui sistem tabela ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh petani

di Kabupaten Tangerang. Biasanya petani kita menanam padi secara tradisional dengan menyemai benih selama 20 hari sebelum ditanam. Melalui tabela, benih cukup diredam selama satu hari kemudian ditabur menggunakan teknologi alat tabur," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa sistem tabel dinilai jauh lebih efisien dari segi waktu dan mampu memangkas biaya tanam secara signifikan. Dengan adanya penerapan teknologi ini, DPKP Kabupaten Tang-

erang menargetkan adanya lonjakan produktivitas hasil panen hingga mencapai 10 ton per hektare.

"Ke depannya, selain di Desa Klebet, DPKP juga akan memperluas pelaksanaan demplot padi di berbagai lokasi Desa Mandiri Pangan TA 2026 lainnya. Lokasi tersebut meliputi Desa Kaliasin di Kecamatan Sukamulya, Desa Pagenjahan di Kecamatan Kronjo, Desa Tanjung Anom di Kecamatan Mauk, dan Desa Mekar Jaya di Kecamatan Sepatan," kata dia. (ANT/RUS)

Pemkab Lebak Sebut 35 KDMP Sudah Beroperasi Jalani Usaha

LEBAK, BANPOS - ?Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak menyebut sebanyak 35 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya sudah beroperasi menjalankan kegiatan pengembangan usaha dan bertransaksi dengan konsumen.

"Semua KDMP yang beroperasi itu secara mandiri masyarakat dan

tidak dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara," kata Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa di Lebak, Rabu (26/8).

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dipastikan dapat menggerakkan ekonomi desa, sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat yang pada akhirnya dapat

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT, BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Kramat mengumumkan penastanaan Karir Pelayanan Kepastanaan Negara dan Lelang (KPNKL) Serang melalui Jaja Pja Lelang, PT. Globalvision Indonesia yang melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap aset-aset jaminan Jaja PT. BERLIN PRATAMA NUSANTARA sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 126 m² beriklat bangunan dan segala sesuatu yang beriklat/bertanah di dalamnya sesuai SHM No. 1209/Kabupaten Jember dan nama HALSAH beriklat di J. Kenanga RT. 02 RW. 04, Desa/Kelurahan Koberdandan, Kecamatan Panuwakota, Kota Cilegon, Provinsi Banten
- Nilai Limit Rp. 129.000.000,- (Serang yang jaminan Rp. 15.000.000.000,-)
- Sebidang tanah seluas 138 m² beriklat bangunan dan segala sesuatu yang beriklat/bertanah di dalamnya sesuai SHM No. 425/Kabupaten Jember dan nama HALSAH beriklat di Blok Kenanga RT. 02 RW. 04, Desa/Kelurahan Koberdandan, Kecamatan Panuwakota, Kota Cilegon, Provinsi Banten
- Nilai Limit Rp. 180.000.000,- (Serang yang jaminan Rp. 20.000.000.000,-)
- Sebidang tanah seluas 508 m² beriklat bangunan dan segala sesuatu yang beriklat/bertanah di dalamnya sesuai SHM No. 1207/Kabupaten Jember dan nama HALSAH beriklat di J. Kenanga RT. 02 RW. 04, Desa/Kelurahan Koberdandan, Kecamatan Panuwakota, Kota Cilegon, Provinsi Banten
- Nilai Limit Rp. 450.000.000,- (Serang yang jaminan Rp. 45.000.000.000,-)

Yang akan dilaksanakan pada :

Hak Tanggung	Kramat, 10 September 2020
Waktu Penawaran	Sebagi banyang pada aplikasi lelang di atas batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	Kramat, 10 September 2020
	Pukul 10.45 WIB (sesuai Waktu Serang)
Tempat Lelang	KPNKL Serang
	Jl. Raya Serang-Cilegon KM 3 Legok Serang, Ruang Lelang
Penastanaan Penastanaan	Sebelum hasil akhir penastanaan
Bayan Lelang Pembeli	2% (dua persen) dari harga teratas lelang
Pelepasan Harga Lelang	Paling Lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelepasan Lelang

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI KAS TANGGUNGAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk selaku pemegang Kas Tanggungan Pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan penyaritaraan Kantor Pelayanan Publik Negara dan Lelang (KPNKL) Serang, akan melaksanakan **Lelang Eksekusi Kas Tanggungan** terhadap barang jaminan debitur atas nama **ANNISA OCTAVIANA DJAJA**, sebagai berikut:

- **Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 05983 An. Annisa Octaviana Djaja**, Dengan luas tanah 72 m2 yang terletak di Blok Perumahan Permata Mutiara Jawa Cluster Montana No. D1/77 Desa/Kel Kur Badak Kec. Maju Kab.Lebak Provinsi Banten.

Harga Limit	• Rp. 280.000.000,-
Uang Jaminan	• Rp. 84.000.000,-

Distribusi Pelaksanaan Lelang:	Keterangan:
• Cara Penawaran: Open Bidding (dengan mengakses "lelang.go.id")	• Nominal Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan
• Batas Akhir Penawaran : Kamis, 10 September 2026 Pukul 11:30 WIB (waktu server)	• Nominal Jaminan yang disyaratkan,
• Penetapan Pemegang Lelang: setelah batas akhir penawaran	• Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPNKL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang
• Pelunasan Harga: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut dinyatakan sebagai pemungutan dan uang jaminan menjadi milik negara.	• Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.
• Tempat Pelaksanaan Lelang : KPNKL Serang, Jl. Raya Serang-Cilegon Km 3 Legok Serang Provinsi Banten	

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website "lelang.go.id" persyaratan dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Pengguna" pada alamat website tersebut.
2. Memiliki obyek lelang yang akan diikuti pada website diatas
3. Menytor yang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti obyek lelang
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
5. Obyek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya, sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, para pihak-pihak yang berkepentingan/peminal lelang tidak diperkanakan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada PKPNL Serang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Kangkasabungtit dan peserta wajib melihat, mengetahui kondisi obyek lelang dan menyetujui aspek legal yang diilang sesuai apa adanya.
6. Syarat-syarat lainnya yang diumumkan pada saat lelang, penjelasan dan informasi lelang lainnya dapat menghingbun Bank bjb Cabang Kangkasabungtit Telp. 0252- 201243 / (Wilheymy Kml 87877000516 / Mochemard Rizky Triawan 08782220191) PKPNL Serang, Ji. Raya Serang-Cikeas K 3 Legok Serang Provinsi Banten.

PENGUMUMAN KEDUA Lelang EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Oke Aset Indonesia selaku pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 1 Tahun 1998 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPPN), Serang, melalui jasa Pro Lelang PT. Balai Mandiri Prasarastra (Baleman) akan melaksanakan lelang terhadap aset berikut ini: **NIENK NURJAHNNA**

Sebagian tanah seluas 542 bukiti bangunan bertingkat diatas, sesuai dengan SHGB No. 12801/Cungubada (Berakirahnya HK 28 Maret 2045) terdapat atas nama Nienk Nurjahan yang diikat di BSN: AS2 No. 01, Desa/Kelurahan/Cungubada, Kecamatan Majas, Kabupaten Lelang, Provinsi Banten (selanjutnya selanjut diikleng dengan Perumahan Oka Majas Raya 2, Ruko Oka Business Avenue 2 Blok AS2 No. 1, Desa/Cungubada, Kecamatan Majas, Kabupaten Lelang, Provinsi Banten. (Limit Rp. 431.000.000,- ; Jaminan Rp. 86.200.000,-)

Peleksaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) pada:

Tanggal	: Kamis
Hari	: 10 September 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tárgy pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 10 September 2026 pukul 10:10 WIB (pesual waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPPKN Serang, Jl. Raya Serang – Cilengon, Km.3 Lenggok Serang
	: Ruang Lelang

Penetapan Pemegang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan tata cara pelelangan :

1. Penawaran Lelang disetorkan ke sebuah platform lelang (e-Auction) dengan penawaran terbalik (open bid) pada domain lelang.go.id Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendapatkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam dan mengupload softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (untuk jaminan) dan dibuktikan dengan foto dan nomor tersebut.
3. Peserta lelang wajib menyertai jumlah penawaran ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan jumlah jaminan yang disyarkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (diciil secara resmi) harus sudah efektif diterima oleh KPPN selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Jika sebelum lelang disetorkan ke nomor **Virtual Account (VA)** masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas syarikat sesuai dokumen yang diberikan.
5. Harga penawaran belm termasuk bea lelang sebesar 2% dan biaya resmi lainnya.
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajiban pialang lelang 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi jumlah jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendaftaran yang dinyatakan.
7. Pemenang lelang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% dari nilai total lelang yang wajib disetorkan ke rekening penawaran PT Oke Aset Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang.
8. Penerimaan SPHT atas perolehan tanah dan bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
9. Peserta lelang diwajibkan melunai, mengetahui dan menyetujui aspek lelang yang akan dijual, sesuai apa adanya (kondisi as is), obyek dapat dilihat sejak pengumuman ini diterbitkan.

Untuk pembelian lelang pengambilan Sertipikat dan dokumen-dokumen lainnya diwajibkan di Kantor PT. Oke Aset Indonesia, Jl. Batu Ceper No. 47/Gambar, Jakarta Pusat 10120. Penyerahan Sertipikat dan dokumen-dokumen lainnya yang dilakukan di luar wilayah Kantor PT. Oke Aset Indonesia akan dikenakan biaya tambahan.

1. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPPN Serang atau PT. Oke Aset Indonesia.
2. Keterangan lebih lanjut hubungi PT. Oke Aset Indonesia, KPPN Serang atau Balai Mandiri Prasarastra (2021) 3867183/84.



PT. Oke Aset Indonesia
Ttd
PT. Oke Aset Indonesia

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Oke Asti Indonesia, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dari cara penawaran melalui internet atas barang tidak bergerak dalam kondisi apa adanya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang dengan penantara jasa prelelang PT. Power Asesindo Selandra, terhadap jaminan Debitur an. **MUTIARA NUGUSTIAN** bernomor :

- 1 (satu) unit bidang tanah seluas 60m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHGB Elektronik NIB : 18.01.000405239.0 terdapat atas nama **MUTIARA NUGUSTIAN**, terletak di Grand Pesona Cilacap Blok B/3/3 Desa Nalungreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Provinsi Banten, (Harga Limit Rp. 157.100.000,-) ; Setoran Jaminan Rp. 31.420.000,-)

Pelaksanaan Lelang:	Keterangan:
- Cara Penawaran: Open Bidding (Melalui Internet) - Hari: Kamis - Tanggal: 10 September 2026 - Waktu Penawaran: Sejak pukul aplikasi s.d batas akhir penawaran - Batas Akhir Penawaran: 10 September 2026 pukul 10.40 WIB (Sesuai Waktu Server) - Alamat Domain: lelang.go.id - Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang - Biaya Lelang Pemenuhan: 10% dari harga lelang - Tempat Lelang : KPKNL Serang, Jl. Raya Serang-Cilegon Km. 3, Legok Serang E Auction Corner - Penetapan Pemenuhan: Setelah batas akhir penawaran	- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan. - Jaminan harus diatas efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. - Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat Kelang :

1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada alamat website **elang.go.id** | Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti elang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Obyek elang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, atau pembatalan/pengunduran kembali atas pembelian elang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminal elang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPNKL Serang dan PT Oke Asset Indonesia Serta PT Power Assetindo Selaras.
3. Setelah selesai mengadakan transaksi, pembeli akan menerima kode elang melalui email. Pengumuman ini terdiri sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan elang.
4. Ditambahkan Penerimaan Pemegang Elang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 tahun 2016 dikonsolidasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% dari nilai laku elang yang wajib dikenakan ke rekening penampungannya PT Oke Asset Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pelaksanaan elang.
5. Untuk pemegang elang pengambalian Sertipikat dan dokumen-dokumen lainnya dilakukan di Kantor PT.Oke Asset Indonesia Jakarta Pusat. Sementara itu, proses pengembalian elang lainnya yang dilakukan di luar wilayah Kantor PT Oke Asset Indonesia akan dikenai biaya tambahan.
6. Untuk laimnya dapat menghubungi KPNKL Serang 0254 – 20999, PT Oke Asset Indonesia, Telp. 021- 30405999 atau PT Power Assetindo Selaras, Telp 021 – 21263211 , 0811845854



Tid
 KPKNL SERANG PT Oke Asset Indonesia

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Oke Asti Indonesia, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang cara penawaran melalui internet atas barang tidak bergerak dalam kondisi apa adanya meliputi Kantor Pelayanan Keayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang dengan penantara jasa prelelang PT. Power Assetindo Nusantara, terhadap jaminan Debitur an, TTIN, S.Pd.I berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 30m² berdimensi bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 1642/SENTU/ terdapat atas nama BOHARI, terlekat di Blok S02 (setempat dikenal dengan Jl. KH. Syuhada RT/RW 015/005), Desa Sentul, Kecamatan Kraghan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, (Harga Limit Rp. 564.725.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 112.945.000,-)

Pelaksanaan Lelang:	Keterangan:
Cara Penawaran: Open Bidding (Melalui Internet)	Nominal Jaminan yang disetorakan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal Jaminan yang diserahkan.
Hari: Kamis	Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambanya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
Tanggal: 10 September 2026	Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme penawaran menjadi beban peserta lelang.
Waktu Penawaran: Sejak tanggal aplikasi s.d. batas akhir penawaran	
Batas Akhir Penawaran: 10 September 2026 pukul 10:50 WIB (Sesuai Server)	
Alamat Domain: lelang.go.id	
Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang	
Tempat Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang	
Berat Lelang : KPKNL Serang, Jl. Raya Serang-Cilegon Km. 3, Legok Serang E Auction Center	
Penetapan Pememenang: Setelah batas akhir penawaran	

Syarat-Syarat Lelang :

1. Memili Akun yang telah terverifikasi pada alamat website lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Obayk lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/pengunduran pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminal lelang tidak dipertanggungjawabkan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KFKPI.
3. Setelah PT. Oke Ases Indonesia menerima Surat Perintah Pengeluaran Uang (SPPU) dari KFKPI.
4. Peminal lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang melalui Pengumuman in terbit sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
5. Dibawahnya Penyertaan Pememen lelang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penempatan Oke Ases Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
6. Untuk penang lelang pengambiln Sertipikat dan dokumen-dokumen lainnya yang dilakukan di Kantor PT.Oke Ases Indonesia, Jakarta Pusat, Penyerahan sertifikat dan dokumen-dokumen lainnya yang dilakukan di luar wilayah Kantor Oke Ases Indonesia dan Kantor PT.Oke Ases Indonesia.
7. Untuk biaya dapat menghubungi KFKPI. Serang 0254 – 201999, PT. Oke Ases Indonesia, Telp. 021- 30405999 atau Serang 021. PT. Awer Asset Selaras, Telp 021 – 21263211, 0811845854

Jakarta, 27 Agustus 2026

Ttd

KPKPI, SERANG **PT. Oke Ases Indonesia**





BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

Pemkot Bentuk Tim Inventarisir Anak Tidak Sekolah

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kota Tangerang, membentuk tim lintas sektor yang berisi perangkat daerah untuk menginventarisir anak tidak sekolah (ATS) agar memperoleh akses pendidikan dan dapat melanjutkan proses belajar sesuai kebutuhan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar di Tangerang, Rabu (26/8) mengatakan, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menyiapkan tim yang melibatkan perangkat daerah hingga perangkat kewilayahan untuk memastikan intervensi dapat dilakukan secara menyeluruh.

Tim tersebut akan melibatkan sejumlah perangkat daerah di antaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo dan DP3AP2KB. Perangkat kewilayahan juga memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak dalam proses validasi data dan pelaksanaan intervensi di lapangan.

Ia menjelaskan, masing-masing perangkat daerah memiliki peran sesuai dengan kewenangan. Bappeda berperan dalam koordinasi perencanaan dan kebijakan lintas sektor, sementara Dinas Pendidikan memastikan akses serta mutu

pendidikan.

"Dinas Sosial turut berperan dalam melihat akar persoalan sosial ekonomi keluarga. Sementara Dukcapil membantu menyelesaikan kendala administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi akses anak terhadap layanan pendidikan," kata Wahyudi.

Dia menambahkan, di tingkat kewilayahan, kelurahan dan kecamatan akan diperkuat dalam proses verifikasi. Operator sekolah juga dilibatkan untuk mencocokkan data dengan kondisi faktual di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi anak sekaligus dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

"Penanganan tidak berhenti pada proses pendataan. Pemkot Tangerang juga menyiapkan pendekatan langsung melalui home visit dengan melibatkan perangkat kewilayahan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada keluarga sekaligus memahami kendala yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan," papar Wahyudi.

Selain memperluas akses pendidikan, intervensi juga diarahkan pada peningkatan mutu dan pen-

ciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Pemkot Tangerang mendorong pembelajaran mendalam, pembiasaan positif serta penguatan sekolah ramah anak sebagai bagian dari upaya menjaga keterikatan anak dengan sekolah.

DP3AP2KB juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan pencegahan pernikahan dini, termasuk pendampingan psikologis bagi anak yang menghadapi trauma, kekerasan maupun persoalan lainnya.

"Dari sisi tata kelola, Pemkot Tangerang akan memperkuat dashboard monitoring terpadu dengan melakukan sinkronisasi data pendidikan, administrasi kependudukan dan data kesejahteraan sosial. Integrasi tersebut diharapkan dapat menjadi basis dalam menentukan kebijakan dan intervensi secara lebih tepat," kata Wahyudi.

Melalui pembentukan tim lintas sektor, Pemkot Tangerang berkomitmen memperkuat ekosistem pendidikan melalui program Gampang Sekolah. "Pemerintah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan intervensi berjalan berkelanjutan dan setiap anak tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan," katanya.(ANT/RUS)



Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar



Wakil Walikota Tangerang Maryono.

Maryono Siapkan Dana Rp2,1 Triliun

Disebar ke Sejumlah Dinas, Untuk Wujudkan Kota Sehat

TANGERANG, BANPOS - Pemerintah Kota Tangerang, mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,1 triliun yang dibagi ke sejumlah dinas untuk memperkuat komitmen mewujudkan Kota Sehat

Wakil Walikota Tangerang Maryono di Tangerang, Rabu (26/8) mengatakan peningkatan dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun Kota Sehat secara berkelanjutan.

"Anggaran untuk mewujudkan Kota Sehat mengalami peningkatan dari Rp1,26 triliun pada 2024 menjadi Rp2,1 triliun pada 2026," kata Maryono di Puspemkot Tangerang.

Ia menjelaskan dukungan anggaran tersebut direalisasikan untuk memperkuat sinergisitas program mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai kolaborasi di tingkat kewilayahan termasuk Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS).

Sejalan dengan itu, komitmen tersebut diperkuat dengan pencapaian program Kota Sehat di Kota Tangerang seperti peningkatan Indeks Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 75,7 (2025), Posyandu aktif mencapai 100 persen (2025), sampai penurunan Angka Kematian Ibu yang hanya ada enam kasus pada tahun 2025.

Pemkot Tangerang juga mencatatkan peningkatan indeks kesehatan mencapai 87 persen (2025) bahkan menurunkan prevalensi stunting hingga menyenyal 11,2 persen di bawah rata-rata prevalensi stunting di Provinsi Banten (21,1 persen) dan nasional (19,8 persen).

"Saat ini, Pemkot Tangerang menargetkan dapat meraih peng-

hargaan tertinggi Swasti Saba Wistara Paripurna dalam penilaian KKS sekaligus terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan kewilayahan dalam mewujudkan Kota Tangerang yang sehat dan berkelanjutan," katanya.

Ketua Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS) Siti Rochayah menyambut baik dukungan yang telah diberikan semua pihak khususnya dari Pemkot Tangerang. Berdasarkan data terakhir, Kota Tangerang telah menuntaskan pemberkasan 100 persen dengan nilai dokumen mencapai 99,7 persen.

Menurut dia, hanya dibutuhkan peningkatan sekitar 0,3 persen untuk meraih penghargaan tertinggi, yaitu Swasti Saba Wistara Paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

"Kami berharap kerja keras dan kolaborasi yang telah dilakukan selama ini membuahkan hasil yang diinginkan, tidak hanya predikat penghargaannya melainkan dampak dari manfaat dan inovasi programnya bisa dirasakan langsung masyarakat," kata Rochayah.

Selain itu, sejumlah program dan inovasi yang dijalankan Pemkot Tangerang dan FKTS juga mendapatkan apresiasi yang dinilai telah menginspirasi terobosan pembangunan kota sehat yang berkelanjutan bagi daerah kabupaten dan kota lainnya khususnya di Provinsi Banten.

"Kota Tangerang selama ini selalu menjadi yang terbaik di Provinsi Banten. Adanya verifikasi ini untuk membuktikan sekaligus mendorong Kota Tangerang agar bisa terus berinovasi ke depannya," kata perwakilan Tim Pembina KKS Provinsi Banten Siti Maryam.(ANT/RUS)

Walikota: Bijak Gunakan Teknologi Upaya Jaga Kesehatan Mental Remaja

TANGERANG, BANPOS - Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengingatkan para remaja untuk bijak menggunakan teknologi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental di tengah perubahan pola pergaulan dan interaksi di era digital.

Ia mengatakan, kesehatan mental menjadi perhatian penting karena tantangan yang dihadapi remaja saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Perkembangan teknologi membuat aktivitas dan interaksi anak semakin banyak dilakukan melalui perangkat digital.

"Nah, anak-anak sekaliian, kesehatan mental ini sangat berpengaruh untuk masa depan kalian dan ini harus dijaga banget," ujar Walikota Benyamin saat membuka Seminar Kesehatan Remaja yang digelar Dinas Kesehatan di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Rabu (26/8).

Ia mencontohkan perubahan pola aktivitas anak-anak saat ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jika dahulu anak-anak lebih banyak melakukan aktivitas



Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie berbincang dengan remaja saat membuka Seminar Kesehatan Remaja yang digelar Dinas Kesehatan di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel.

fisik dan berinteraksi secara langsung, kini berbagai aktivitas dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam.

Penggunaan gawai juga membuat remaja lebih banyak berkomunikasi dengan teman melalui dunia maya atau ruang digital dibandingkan berbincang secara langsung dengan orang tua di rumah.

"Padahal ibu kamu ada di sebelah kamu, bapak kamu ada di sebelah kamu, kakak kamu juga ada di sebelah kamu. Ada di rumah, tapi kenapa curhatnya selalu sama teman saja," kata Benyamin.

Karena itu, ia meminta para remaja tidak hanya bijak dalam menggunakan teknologi, tetapi

juga memiliki nilai dalam kehidupan. Nilai tersebut antara lain kejujuran, rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, bersikap baik kepada teman, serta saling membantu.

"Dalam diri kamu harus punya nilai. Jangan menjadi kertas kosong yang tidak punya nilai," ucapnya.

Selain itu, Benyamin mengingatkan para remaja agar mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko dan dampaknya. Menurutnya, kemampuan mengambil keputusan menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental sekaligus membentuk karakter sejak usia remaja.

Ia juga mengingatkan para remaja untuk menjauhi kekerasan, penggunaan senjata tajam, dan pergaulan bebas.

"Pilihan bukan ada di ibu kamu, pilihan bukan ada di orang tua kamu, pilihan bukan ada di pemerintah kota, tapi ada di diri sendiri untuk jadi orang bernilai. Jadi ingat ya, pilih keputusan dengan baik," tegasnya.(ANT/RUS)

Legislator Dorong Izin Kawasan Industri Maksimal Tiga Bulan

TANGERANG, BANPOS - Ketua

Tim Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong proses perizinan kawasan industri dipangkas menjadi maksimal tiga bulan untuk memberikan kepastian kepada investor.

Menurut Chusnunia, lamanya proses perizinan masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi investor meskipun sistem pelayanan telah dilakukan secara daring dan terintegrasi.

"Sistem sewa dengan sudah bayar sewa meskipun sebelum dapat perizinan, itu kalau perizinan bisa sampai enam bulan sampai setahun, investor mengalami kerugian yang cukup besar. Satu, alatnya tidak bisa berproduksi, yang kedua dia sudah bayar sewa panjang," katanya usai peninjauan dan diskusi dalam rangka penyusunan RUU Kawasan Industri di Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/8).

Oleh karena itu, Chusnunia menilai pemangkasan proses perizinan menjadi maksimal tiga bulan me-

rupakan langkah yang masuk akal.

Namun, ia mengingatkan percepatan perizinan tidak boleh mengabaikan proses terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pengembangan dan hilirisasi industri.

"Artinya nanti dalam RUU Kawasan Industri ini sampai ke arah sana," katanya.

Komisi VII DPR RI saat ini tengah menyusun RUU tentang Kawasan Industri melalui panitia kerja dengan menjaring masukan dari pengelola kawasan dan pemangku kepentingan industri.

Kemudahan perizinan, kepastian berusaha, pertanahan, tata ruang, infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan menjadi sejumlah persoalan yang dihimpun Panja dalam proses penyusunan RUU tersebut.

Chusnunia mengatakan komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi kawasan industri.

"Sebenarnya ketika industri

menghadapi persoalan, itu tidak perlu takut untuk berkomunikasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karena kita tentu dukung industri yang sehat, industri yang bisa berjalan dengan baik, beriring dengan angka pertumbuhan ekonomi yang baik," katanya.

Ia menilai Kawasan Industri Cikupa Mas merupakan salah satu kawasan yang relatif sehat dengan tingkat okupansi maksimal. Berdasarkan paparan dalam diskusi, komposisi investornya sekitar 60 persen asing dan 40 persen domestik.

"Jadi di sini termasuk kawasan industri yang relatif sehat dengan okupansi yang maksimal, dan perbandingan tadi dari diskusi kita tahu bahwa 60 persen investor asing, 40 persen lokal," katanya.

Menurut dia, pengalaman pengelolaan kawasan tersebut dapat menjadi salah satu masukan bagi pengembangan kawasan industri di daerah lain, termasuk Indonesia bagian timur

yang memiliki potensi bahan baku untuk hilirisasi.

Selain perizinan, Chusnunia menyoroti persoalan lingkungan di sejumlah kawasan industri lama yang belum sepenuhnya menerapkan konsep industri hijau.

Ia mendorong pemangku kepentingan mengambil langkah konkret menuju industri hijau, termasuk menyediakan lahan yang memadai untuk pengelolaan limbah.

Chusnunia juga mendorong pengawasan terhadap hasil pengolahan limbah melalui pengujian laboratorium, termasuk terhadap kualitas air buangan setelah melalui proses pengolahan.

Selain itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap penggunaan air tanah oleh industri agar tetap berada dalam batas aman dan tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat sekitar.

"Jangan sampai malah itu yang jadi isu selama ini, habis airnya dipakai oleh industri," katanya.(ANTRUS)

